



PISAgroNEWS

Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture

ISSUE NO. 62:
APRIL 2026

Special Edition: **Building Resilient Food Systems through Regenerative and Sustainable Supply Chains**



Contact Us:  contact@pisagro.org  www.pisagro.org  [pisagro_secretariat](https://www.instagram.com/pisagro_secretariat)    PISAgro

Daftar Isi

03 Kata Pengantar

Opening Remarks

04 Tentang PISAgro

05 About PISAgro

06 Prolog

Edisi Bulan Bumi: Pertanian Regeneratif dan Solusi Berbasis Alam untuk Sistem Pangan Tangguh Iklim

10 Prologue

Earth Month Edition: Regenerative Agriculture and Nature-Based Solutions for Climate-Resilient Food Systems

14 Fitur

Analisa Data Impor Komoditas Pertanian di Indonesia Antara 2024 & 2025

20 Feature

Analysis of Indonesia's Agricultural Commodity Imports' Data Between 2024 & 2025

24 Fitur

Lebih Dari Sekedar Musim Perayaan, Membangun Rantai Pasok Pangan yang Tangguh di Indonesia

28 Feature

Beyond the Festive Season: Building Resilient Food Supply Chains in Indonesia

32 Kabar PISAgro

Perkuat Industri Pangan, Indofood Sukses Makmur Raih Sabet Penghargaan Bergengsi 2026

34 PISAgro Update

Strengthening the Food Industry, Indofood Sukses Makmur Wins Prestigious 2026 Award

36 Sorotan - PISAgro 2.0 (April 2026)

39 Highlights - PISAgro 2.0 (April 2026)

42 Sorotan

59 Highlights

76 Profil

Memberdayakan Petani: Kisah Ibu Mery, Petani Kakao Perempuan Binaan Koltiva dari Aceh Tenggara

79 Profile

Empowering Farmers: The Story of Mrs. Mery, a Female Cocoa Farmer Supported by Koltiva from Southeast Aceh

Tim Editorial

KONTEN

Fathan Oktrisaf
Ferial Lubis
Hendri Surya W.
Nadia Fairus
William Widjaja
Alicia Ceu
Haridi Walid

DESAIN & TATA LETAK

Hendri Surya W.

KONTRIBUTOR FOTO

Anggota & Mitra
PISAgro, Istimewa

Kata Pengantar



Insan Syafaat

Direktur Eksekutif
Sekretariat PISAgro

Rekan-rekan yang Terhormat,

Selamat datang di PISAgro News edisi April 2026. Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 dan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Dua momentum ini mengingatkan kita bahwa masa depan sistem pangan Indonesia tidak hanya dibangun melalui produksi dan teknologi, tetapi juga melalui penghargaan terhadap para pekerja, petani, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi pembangunan pertanian dan pangan nasional.

Dalam semangat Bulan Bumi, rubrik Prolog menghadirkan tulisan “Pertanian Regeneratif dan Solusi Berbasis Alam untuk Sistem Pangan Tangguh Iklim”, yang membahas pentingnya praktik pertanian regeneratif dan pendekatan berbasis alam dalam membangun sistem pangan yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Pada rubrik Fitur, kami menghadirkan dua artikel utama. “Analisa Data Impor Komoditas Pertanian di Indonesia Antara 2024 & 2025” mengulas dinamika impor komoditas pertanian dan tantangan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, “Lebih Dari Sekedar Musim Perayaan, Membangun Rantai Pasok Pangan yang Tangguh di Indonesia” menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok pangan serta kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan global.

Di rubrik Kabar PISAgro, kami mengangkat artikel “Perkuat Industri Pangan, Indofood Sukses Makmur Raih Sabet Penghargaan Bergengsi 2026”, yang mencerminkan pentingnya inovasi dan kontribusi sektor industri pangan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pada rubrik Profil, kami menampilkan kisah inspiratif “Memberdayakan Petani: Kisah Ibu Mery, Petani Kakao Perempuan Binaan Koltiva dari Aceh Tenggara”, yang menggambarkan peran penting perempuan dalam sistem pangan serta pentingnya akses terhadap pendampingan dan praktik pertanian berkelanjutan.

Kami berharap edisi April 2026 ini dapat menjadi ruang refleksi sekaligus sumber inspirasi untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem pangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Selamat membaca dan kami berharap bahwa edisi kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita semua mengenai upaya-upaya luar biasa yang dilakukan dalam mendukung sektor pertanian Indonesia.

Opening Remarks



Insan Syafaat

Executive Director
PISAgro Secretariat

To our distinguished readers,

Welcome to the April 2026 edition of PISAgro News. Happy International Workers' Day on May 1st, 2026, and Happy National Education Day on May 2nd, 2026. These two important occasions remind us that the future of Indonesia's food system is built not only through production and technology, but also through appreciation for workers and farmers, as well as strengthening human capital capacity as the foundation of national agricultural and food development.

In the spirit of Earth Month, our Prologue section presents the article “Regenerative Agriculture and Nature-Based Solutions for Climate-Resilient Food Systems,” which discusses the importance of regenerative agricultural practices and nature-based approaches in building more resilient and sustainable food systems.

In the Feature section, we present two main articles. “Analysis of Indonesia's Agricultural Commodity Imports Between 2024 & 2025” reviews the dynamics of agricultural commodity imports and the challenges of national food security. Meanwhile, “Beyond the Festive Season: Building Resilient Food Supply Chains in Indonesia” highlights the importance of strengthening food supply chains and cross-sector collaboration in addressing global challenges.

In the PISAgro Update section, we feature the article “Strengthening the Food Industry, Indofood Sukses Makmur Wins Prestigious 2026 Award,” which reflects the importance of innovation and the contribution of the food industry sector in strengthening national food security.

In the Profile section, we present the inspiring story “Empowering Farmers: The Story of Mrs. Mery, a Female Cocoa Farmer Supported by Koltiva from Southeast Aceh,” which illustrates the important role of women in food systems as well as the importance of access to assistance and sustainable agricultural practices.

We hope this April 2026 edition serves as both a space for reflection and a source of inspiration to further strengthen cross-sector collaboration in building a resilient, inclusive, and sustainable food system in Indonesia.

Happy reading, and we hope this edition enriches your understanding of the outstanding efforts being made to support Indonesia's agricultural sector.



Kelompok Kerja

Setiap kelompok kerja wajib mengembangkan rantai pasok dengan lengkap dari hulu ke hilir dan menyusun rencana kerja yang meliputi kebutuhan permodalan, target produksi, target pembelian, target pelatihan petani, hingga waktu pelaksanaannya. Setiap rantai pasok melaksanakan berbagai proyek percontohan, mulai dari pelatihan petani mengenai pengelolaan kebun yang baik hingga membuka ketersediaan akses keuangan dan jaminan pembelian.



AgriTech & Inovasi Digital



Kakao



Kacang Tanah



Kopi



Jagung



Susu



Hortikultura



Pemberdayaan Perempuan



Kemampuan-
telusuran



Kelapa Sawit



Kentang



Karet



Kelapa



Padi



Sapi Potong



Pengembangan
Kapasitas



Pendapatan
Hidup



Pertanian
Regeneratif

Sekretariat PISAgro

Insan Syafaat
Direktur Eksekutif

Fathan Oktrisaf
Manajer Pelibatan Strategis

Alicia Ceu
Spesialis Pelibatan Strategis

Hendri Surya Widcaksana
Manajer Komunikasi

Nadia Fairus
Manajer Perkantoran

Ferial Lubis
Konsultan Pendukung Hubungan Pemerintah

William Widjaja
Manajer Proyek & Media Sosial

Haridi Walid
Pemegang



Working Groups

Every working group is required to develop their chain supply from their downstream line to the upstream as well as formulating a working plan which includes capital needs, production target, purchasing order target, farmers' training, as well as their training schedules. Every supply chain is also required to carry out various pilot projects, ranging from farmers' training on proper plantation management methods to enabling financial access and purchase protection.



Agritech & Digital Innovation



Palm Oil



Cocoa



Potato



Peanut



Rubber



Coffee



Coconut



Corn



Rice



Dairy



Cattle



Horticulture



Capacity Building



Women Empowerment



Living Income



Traceability



Regenerative Agriculture

PISAgro Secretariat

Insan Syafaat
Executive Director

Fathan Oktrisaf
Strategic Engagement Manager

Alicia Ceu
Strategic Engagement Specialist

Hendri Surya Widcaksana
Communications Manager

Nadia Fairus
Office Manager

Ferial Lubis
Government Relation Support Consultant

William Widjaja
Project Management & Social Media Officer

Haridi Walid
Intern

Prolog

Edisi Bulan Bumi: Pertanian Regeneratif dan Solusi Berbasis Alam untuk Sistem Pangan Tangguh Iklim

Hendri Surya W. (Artikel ini ditulis dan dirangkum dari berbagai sumber)



Setiap bulan April, dunia memperingati Bulan Bumi/*Earth Month* sebagai momentum refleksi terhadap hubungan antara manusia, alam, dan masa depan planet yang semakin menghadapi tekanan perubahan iklim. Dalam diskusi mengenai transisi menuju ekonomi rendah karbon, sektor pertanian sering berada pada posisi yang kompleks: di satu sisi menjadi salah satu sektor yang terdampak paling besar oleh perubahan iklim, namun di sisi lain juga memiliki potensi besar sebagai bagian dari solusi.

Sektor pertanian berkaitan langsung dengan penggunaan lahan, air, keanekaragaman hayati, serta jutaan mata pencaharian masyarakat pedesaan. Karena itu, transformasi sistem pertanian tidak lagi hanya berbicara tentang peningkatan produksi,

tetapi juga tentang bagaimana produksi pangan dapat berjalan seiring dengan pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi.

Dalam konteks ini, konsep *Agriculture for Climate and Nature* semakin mendapat perhatian global. Pendekatan ini menempatkan pertanian bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi sebagai bagian dari solusi iklim dan konservasi alam melalui praktik regeneratif, pendekatan berbasis alam (*nature-based solutions*), serta penguatan peran petani kecil dalam membangun ketahanan iklim.

Pertanian dan Tantangan Iklim Global

Perubahan iklim memberikan dampak yang

semakin nyata terhadap sektor pertanian. Pola cuaca yang tidak menentu, kekeringan, banjir, penurunan kualitas tanah, hingga meningkatnya serangan hama dan penyakit menjadi tantangan yang dihadapi petani di berbagai wilayah.

Di Indonesia, dampak tersebut mulai terlihat pada perubahan musim tanam, produktivitas yang fluktuatif, hingga meningkatnya risiko gagal panen pada beberapa komoditas strategis. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya memengaruhi produksi pangan, tetapi juga kesejahteraan petani dan stabilitas sistem pangan nasional.

Pada saat yang sama, sektor pertanian juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, baik dari perubahan penggunaan lahan, deforestasi, penggunaan pupuk sintetis, maupun aktivitas produksi tertentu. Oleh karena itu, transformasi menuju praktik pertanian yang lebih berkelanjutan menjadi semakin penting.

Namun, tantangan ini juga membuka peluang besar. Berbeda dengan banyak sektor lain, pertanian memiliki kemampuan unik untuk tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga menyerap karbon melalui tanah, vegetasi, dan lanskap yang dikelola secara berkelanjutan.

Pertanian Regeneratif: Dari Produksi Menuju Pemulihan Ekosistem

Dalam beberapa tahun terakhir, pertanian regeneratif menjadi salah satu pendekatan yang semakin banyak dibahas dalam transformasi sistem pangan global. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang sering berfokus pada produktivitas jangka pendek, pertanian regeneratif menekankan pemulihan kesehatan tanah, peningkatan biodiversitas, efisiensi sumber daya, serta penguatan ekosistem secara keseluruhan.

Praktik regeneratif dapat mencakup berbagai pendekatan, seperti penggunaan

pupuk organik dan kompos, pengurangan olah tanah berlebihan, integrasi tanaman dan ternak, penanaman tanaman penutup tanah (*cover crops*), agroforestri, pengelolaan air yang lebih efisien, hingga diversifikasi tanaman.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga produktivitas, tetapi juga memperbaiki kemampuan tanah menyimpan karbon dan air. Tanah yang sehat memiliki kapasitas lebih baik dalam menyerap karbon dari atmosfer sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan cuaca ekstrem.

Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik regeneratif dapat membantu menurunkan emisi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan produksi dalam jangka panjang. Selain itu, regenerasi tanah juga berdampak pada peningkatan kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar lahan pertanian.

***Nature-Based Solutions* dan Masa Depan Pertanian**

Di tingkat global, pendekatan Solusi Berbasis Alam/*Nature-based Solutions* (NbS) semakin dipandang sebagai strategi penting dalam menghadapi perubahan iklim. NbS mengacu pada solusi yang memanfaatkan proses alami dan ekosistem untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan, termasuk mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan, dan konservasi biodiversitas.

Dalam sektor pertanian, NbS dapat diwujudkan melalui berbagai praktik seperti restorasi lanskap, perlindungan daerah aliran sungai, agroforestri, rehabilitasi tanah terdegradasi, perlindungan hutan di sekitar area produksi, hingga pengelolaan pertanian yang mendukung biodiversitas.

Pendekatan ini menjadi semakin relevan karena perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan dua krisis yang saling terkait. Sistem pangan global tidak dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa perlindungan terhadap alam.

Organisasi seperti *World Wide Fund for Nature* (WWF) menekankan bahwa masa depan pangan dan masa depan alam tidak dapat dipisahkan. WWF secara global mendorong transformasi sistem pangan yang tidak hanya produktif, tetapi juga melindungi hutan, ekosistem air tawar, dan habitat alami lainnya.

Melalui berbagai programnya, WWF juga mendorong pendekatan lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape approach*), di mana produksi pertanian, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat berjalan secara seimbang. Dalam konteks komoditas seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan perikanan, pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa peningkatan produksi tidak terjadi dengan mengorbankan lingkungan.

Smallholders: Aktor Kunci dalam Ketahanan Iklim

Di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya, petani kecil (*smallholders*) memegang peran sentral dalam sistem pangan. Mereka memproduksi sebagian besar komoditas pangan dan perkebunan, namun juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Karena itu, membangun *climate resilience* atau ketahanan iklim tidak dapat dilakukan tanpa memperkuat kapasitas *smallholders*.

Ketahanan iklim di tingkat petani tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi cuaca ekstrem, tetapi juga akses terhadap informasi iklim, pembiayaan, teknologi, pasar, praktik budidaya yang adaptif, hingga kelembagaan yang kuat.

Ketika petani kecil mendapatkan akses terhadap pendampingan dan teknologi yang tepat, mereka mampu menjadi bagian penting dari solusi iklim. Banyak praktik regeneratif dan berbasis alam justru tumbuh dari pengalaman dan pengetahuan lokal petani sendiri.

Di berbagai wilayah Indonesia, mulai muncul inisiatif yang mengintegrasikan praktik regeneratif dengan pendekatan kemitraan, koperasi, dan digitalisasi pertanian. Pendekatan seperti ini penting karena transisi menuju pertanian rendah emisi membutuhkan dukungan ekosistem, bukan hanya perubahan di tingkat individu petani.

Dari Kepatuhan Menuju Transformasi Sistem

Dorongan terhadap keberlanjutan juga semakin dipengaruhi oleh perkembangan regulasi global, seperti tuntutan transparansi rantai pasok dan komitmen pengurangan emisi. Hal ini mendorong perusahaan agribisnis, eksportir, hingga pelaku rantai pasok untuk mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketertelusuran secara lebih serius.

Namun, transformasi sistem pangan tidak cukup jika hanya didorong oleh kepatuhan terhadap regulasi. Perubahan yang berkelanjutan membutuhkan perubahan cara pandang bahwa investasi terhadap tanah, alam, dan petani merupakan investasi jangka panjang terhadap ketahanan pangan itu sendiri.

Dalam konteks ini, kolaborasi multipihak menjadi semakin penting. Pemerintah, sektor swasta, lembaga pembangunan, organisasi masyarakat sipil, koperasi, hingga petani perlu bergerak dalam ekosistem yang saling mendukung.

Pendekatan seperti *Inclusive Closed Loop* menjadi relevan karena menghubungkan akses pasar, pembiayaan, teknologi, pendampingan, dan keberlanjutan dalam satu sistem yang lebih terintegrasi.

Bulan Bumi sebagai Momentum Refleksi

Bulan Bumi bukan hanya tentang kampanye lingkungan, tetapi juga momentum untuk melihat kembali hubungan antara sistem pangan dan masa depan bumi.

Pertanian masa depan tidak lagi dapat dipisahkan dari isu iklim, biodiversitas, dan keberlanjutan. Produksi pangan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem dan penguatan kesejahteraan petani.

Pertanian regeneratif dan solusi berbasis alam menunjukkan bahwa pertanian dapat menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sumber tekanan terhadap lingkungan. Sementara itu, smallholders menjadi aktor utama yang menentukan apakah transformasi tersebut dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, membangun sistem pangan yang tangguh berarti membangun hubungan yang lebih seimbang antara manusia, alam, dan produksi. Karena masa depan pertanian tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang kita hasilkan, tetapi juga oleh bagaimana kita menjaga tanah, air, hutan, dan komunitas yang menopang sistem pangan itu sendiri.

Dikutip dari berbagai sumber referensi:

1. *Food and Agriculture Organization – The State of Food and Agriculture; Climate-Smart Agriculture reports*
2. *World Wide Fund for Nature – Sustainable Food Systems and Nature-Based Solutions reports*
3. *UN Environment Programme – Nature-Based Solutions for Climate reports*
4. *World Bank – Climate-Smart Agriculture and Smallholder Resilience studies*
5. *Intergovernmental Panel on Climate Change – Climate Change and Land reports*
6. *Kementerian Pertanian Republik Indonesia – Statistik Pertanian dan program pertanian berkelanjutan*

7. *Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik sektor pertanian dan lingkungan Indonesia*

Prologue

Earth Month Edition: Regenerative Agriculture and Nature-Based Solutions for Climate-Resilient Food Systems

Hendri Surya W. *(This article is written and compiled from various sources)*



Every April, the world commemorates Earth Month as a moment of reflection on the relationship between humanity, nature, and the future of a planet increasingly under pressure from climate change. In discussions surrounding the transition toward a low-carbon economy, agriculture often occupies a complex position: on one hand, it is among the sectors most heavily affected by climate change, while on the other hand, it also holds enormous potential as part of the solution.

The agricultural sector is directly connected to land use, water resources, biodiversity, and the livelihoods of millions of rural communities. Therefore, the transformation of agricultural systems is no longer solely about increasing production, but also about ensuring that food production can coexist

with ecosystem restoration and emissions reduction.

In this context, the concept of Agriculture for Climate and Nature has gained increasing global attention. This approach positions agriculture not merely as an economic activity, but as part of the climate and conservation solution through regenerative practices, nature-based solutions, and the strengthening of smallholder farmers' roles in building climate resilience.

Agriculture and the Global Climate Challenge

Climate change is creating increasingly visible impacts on the agricultural sector.

Unpredictable weather patterns, droughts, floods, declining soil quality, and rising pest and disease outbreaks have become major challenges faced by farmers across many regions.

In Indonesia, these impacts are becoming evident through shifting planting seasons, fluctuating productivity, and increasing crop failure risks in several strategic commodities. In the long term, these conditions affect not only food production, but also farmer livelihoods and the stability of national food systems.

At the same time, agriculture also contributes to greenhouse gas emissions through land-use change, deforestation, synthetic fertilizer use, and certain production activities. As a result, the transition toward more sustainable agricultural practices has become increasingly important.

However, this challenge also presents significant opportunities. Unlike many other sectors, agriculture possesses a unique capacity not only to reduce emissions, but also to absorb carbon through sustainably managed soils, vegetation, and landscapes.

Regenerative Agriculture: From Production Toward Ecosystem Restoration

In recent years, regenerative agriculture has become one of the most widely discussed approaches in the transformation of global food systems. Unlike conventional approaches that often focus primarily on short-term productivity, regenerative agriculture emphasizes restoring soil health, enhancing biodiversity, improving resource efficiency, and strengthening ecosystems as a whole.

Regenerative practices may include the use of organic fertilizers and compost, reduced tillage, integrated crop-livestock systems, cover crops, agroforestry,

improved water management, and crop diversification.

These approaches aim not only to maintain productivity, but also to improve the soil's capacity to store carbon and retain water. Healthy soils are better able to absorb atmospheric carbon while increasing resilience to drought and extreme weather conditions.

Numerous studies indicate that regenerative practices can help reduce agricultural emissions while strengthening long-term production resilience. In addition, soil regeneration contributes to improved ecosystem quality and biodiversity surrounding agricultural landscapes.

Nature-Based Solutions and the Future of Agriculture

Globally, Nature-Based Solutions (NbS) are increasingly viewed as critical strategies for addressing climate change. NbS refers to solutions that utilize natural processes and ecosystems to tackle social and environmental challenges, including climate mitigation, food security, and biodiversity conservation.

In agriculture, NbS can take many forms, including landscape restoration, watershed protection, agroforestry, degraded land rehabilitation, forest conservation around production areas, and biodiversity-friendly farming systems.

This approach is becoming increasingly relevant because climate change and biodiversity loss are deeply interconnected crises. Global food systems cannot remain sustainable in the long term without protecting nature.

Organizations such as World Wide Fund for Nature (WWF) emphasize that the future of food and the future of nature are inseparable. Globally, WWF promotes food system transformation that is not only productive, but also protects forests, freshwater ecosystems, and other natural habitats.

Through its various programs, WWF also encourages sustainable landscape approaches, where agricultural production, conservation, and community welfare can coexist in balance. In commodities such as palm oil, cocoa, coffee, and fisheries, this approach is essential to ensure that increased production does not come at the expense of the environment.

Smallholders: Key Actors in Climate Resilience

In Indonesia and many other developing countries, smallholder farmers play a central role in food systems. They produce a significant share of food and plantation commodities, yet they are also among the groups most vulnerable to the impacts of climate change.

Therefore, building climate resilience cannot be achieved without strengthening the capacity of smallholders.

Climate resilience at the farmer level is not only about the ability to cope with extreme weather, but also about access to climate information, financing, technology, adaptive farming practices, markets, and strong farmer institutions.

When smallholder farmers gain access to appropriate support and technology, they can become a crucial part of the climate solution. Many regenerative and nature-based practices actually emerge from farmers' own local knowledge and experiences.

Across various regions in Indonesia, initiatives are beginning to integrate regenerative practices with partnership models, cooperatives, and agricultural digitalization. Such approaches are important because the transition toward low-emission agriculture requires supportive ecosystems, not merely individual behavioral changes among farmers.

From Compliance Toward System Transformation

The push toward sustainability is also increasingly influenced by global regulatory developments, including growing demands for supply chain transparency and emissions reduction commitments. This has encouraged agribusiness companies, exporters, and supply chain actors to pay greater attention to sustainability and traceability.

However, food system transformation cannot rely solely on regulatory compliance. Sustainable change requires a broader shift in perspective, recognizing that investing in soil, nature, and farmers is ultimately a long-term investment in food security itself.

In this context, multi-stakeholder collaboration is becoming increasingly important. Governments, the private sector, development organizations, civil society, cooperatives, and farmers all need to move within mutually supportive ecosystems.

Approaches such as the Inclusive Closed Loop model are increasingly relevant because they integrate market access, financing, technology, extension services, and sustainability within a more connected system.

Earth Month as a Moment of Reflection

Earth Month is not merely an environmental campaign, but also a moment to rethink the relationship between food systems and the future of the planet.

The agriculture of the future can no longer be separated from climate, biodiversity, and sustainability issues. Food production must move hand in hand with ecosystem protection and farmer welfare improvement.

Regenerative agriculture and nature-based solutions demonstrate that agriculture can become part of the solution, rather than merely a source of environmental pressure. Meanwhile, smallholders remain

the key actors determining whether this transformation can proceed in an inclusive and sustainable way

Ultimately, building resilient food systems means building a more balanced relationship between people, nature, and production. Because the future of agriculture will not be determined solely by how much we produce, but also by how well we protect the soil, water, forests, and communities that sustain food systems themselves.

Cited from Various Reference Sources:

1. *Food and Agriculture Organization – The State of Food and Agriculture; Climate-Smart Agriculture reports*
2. *World Wide Fund for Nature – Sustainable Food Systems and Nature-Based Solutions reports*
3. *UN Environment Programme – Nature-Based Solutions for Climate reports*
4. *World Bank – Climate-Smart Agriculture and Smallholder Resilience studies*
5. *Intergovernmental Panel on Climate Change – Climate Change and Land reports*
6. *Kementerian Pertanian Republik Indonesia – Statistik Pertanian dan program pertanian berkelanjutan*
7. *Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik sektor pertanian dan lingkungan Indonesia.*

Analisa Data Impor Komoditas Pertanian di Indonesia Antara 2024 & 2025

Ferial Lubis (Artikel ini ditulis dan diolah dari data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik/BPS)



Tanaman pangan menjadi subsektor yang paling banyak diimpor dibandingkan dengan subsektor Perkebunan, hortikultura dan peternakan. Pada tahun 2024 share volume impor tanaman pangan mencapai 73% dibandingkan total volume impor keempat subsektor tersebut. Sedangkan pada tahun 2025 share tersebut menurun sedikit yaitu 71%.

Volume impor subsektor tanaman pangan 2025 dibandingkan 2024 menurun sebesar 19,20%, sedangkan subsektor perkebunan menurun sebesar 22,29%. Namun untuk subsektor hortikultura dan peternakan volume impor meningkat masing-masing 10,11% dan 6,35% tahun 2025 dibandingkan 2024.

Tabel 1. Data Impor Sektor Pertanian 2024-2025

No	Komoditi	2024		2025		Growth (%)	
		Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Vol	Nilai
1	Tanaman Pangan	27.885.599.916	11.825.671.775	22.531.775.914	7.982.345.613	-19,20	-32,50
2	Perkebunan	6.682.007.694	7.605.135.340	5.192.670.117	7.161.796.331	-22,29	-5,83
3	Hortikultura	1.900.288.950	3.119.948.551	2.092.383.847,70	3.337.192.764,04	10,11	6,96
4	Peternakan	1.983.844.927	4.665.761.556	2.109.847.549,77	5.152.200.182,87	6,35	10,43
	Total impor Pertanian	38.451.741.487	27.216.517.222	31.926.677.429	23.633.534.890		
	Share TP/total (%)	73	43	71	34		
	Sumber: Pusdatin Kementan dan BPS diolah PISAgro						



Gandum, Kedelai, Beras Dan Jagung Impor Tertinggi Komoditi Tanaman Pangan

Bila dilihat data impor subsektor tanaman pangan, maka volume impor terbesar berasal dari komoditas gandum, kedelai, beras dan jagung. Impor gandum pada tahun 2024 mencapai 46% terhadap jumlah ke empat komoditas tersebut, sedangkan bila dibandingkan dengan jumlah impor subsektor tanaman pangan, volume impor gandum mencapai 44% dan dibandingkan dengan total impor sektor pertanian mencapai 32%.

Pada tahun 2025, volume impor gandum mencapai 55% dibandingkan dengan jumlah keempat volume impor tersebut, dibandingkan dengan volume impor tanaman pangan mencapai 52% dan dibandingkan dengan volume impor total komoditi pertanian mencapai 37%. Melihat data ini maka dapat dikatakan ketergantungan Indonesia terhadap komoditas gandum masih cukup tinggi.

“Biji gandum tanpa cangkak” (HS 10019912) pada komoditi gandum yang terbanyak diimpor pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar 9.187.552.520 kg (sekitar 75% dari total volume impor gandum 2024) dengan nilai US\$ 2.758.222.495 dan 10.230.121.495 kg (sekitar 87% dari total volume impor gandum 2025) dengan nilai US\$ 2.870.709.893.

Menurut para ahli, sorghum merupakan komoditas lokal yang berpotensi besar menjadi pengganti gandum untuk mengurangi impor. Sorghum unggul karena tahan kekeringan, tinggi serat, dan bebas gluten. Selain itu, singkong dan sagu juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat alternatif. Sorghum dibudidayakan di lahan kering, seperti NTT dan dapat diolah menjadi tepung untuk mie dan roti, serta kaya serat dan zat besi. Selain itu singkong (ubi kayu) dapat diolah menjadi tepung tapioka atau tepung mocaf (*Modified Cassava Flour*) sebagai pengganti terigu. Sagu juga berpotensi sebagai sumber karbohidrat utama, terutama di wilayah Indonesia Timur, yang dapat diolah menjadi tepung sagu.

Tabel 2. Share Volume dan Nilai Impor Terbesar Komoditas TP Terhadap Jumlah Impor TP dan Impor Pertanian Total (%)

No	Komoditas	2024		2025	
		Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)
1	Gandum/Messlin	12.262.861.461	3.683.690.628	11.758.770.304	3.337.162.795
2	Kedelai	8.192.713.565	4.055.232.394	8.605.092.756	3.513.665.753
3	Beras	4.009.393.185	2.437.595.589	86.100.559	50.496.674
4	Jagung	2.013.419.016	566.258.271	982.110.227	267.547.078
5	Jumlah impor 1-4	26.478.387.227	10.742.776.882	21.432.073.846	7.168.872.300
6	Total Impor TP	27.885.599.916	11.825.671.775	22.531.775.914	7.982.345.613
7	Total Impor Pertanian	38.451.741.487	27.216.517.222	31.926.677.429	23.633.534.890
8	1/5 (%)	46,31		54,87	
9	1/6 (%)	43,98		52,19	
10	1/7 (%)	31,89		36,83	
Sumber: Pusdatin Kementan dan BPS diolah PISAgro					

Volume impor yang menurun tajam pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 adalah komoditas beras dan jagung. Volume impor beras menurun sebanyak 97,85% dengan

penurunan nilai sebanyak 97,93% sedangkan volume impor jagung menurun sebanyak 51,22% dengan penurunan nilai impor sebanyak 52,75%.

Tabel 3. Pertumbuhan Volume dan Nilai Impor Terbesar Komoditi TP tahun 2024 dan 2025

No	Komoditas	2024	2025	Growth	2024	2025	Growth
		Volume (kg)	Volume (kg)	(%)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)	(%)
1	Gandum/Messlin	12.262.861.461	11.758.770.304	-4,11	3.683.690.628	3.337.162.795	-9,41
2	Kedelai	8.192.713.565	8.605.092.756	5,03	4.055.232.394	3.513.665.753	-13,35
3	Beras	4.009.393.185	86.100.559	-97,85	2.437.595.589	50.496.674	-97,93
4	Jagung	2.013.419.016	982.110.227	-51,22	566.258.271	267.547.078	-52,75
Sumber: Pusdatin Kementan dan BPS diolah PISAgro							

Hal ini disebabkan karena produksi beras Januari – Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat sebesar 13,29% (4,07 juta ton) dibandingkan Januari - Desember 2024 sebesar 30,62 juta ton. Hal ini didukung juga adanya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kuat meningkat 221% dalam dua tahun terakhir. Selain itu kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan tahun 2024 mengurangi dampak kekeringan (El Nino), sehingga panen lebih produktif. Dengan demikian sepanjang tahun 2025, impor beras medium praktis berhenti, dengan fokus impor hanya terbatas pada jenis tertentu (seperti *broken rice* untuk industri).

Grafik 1. Perkembangan Produksi Beras Dalam Negeri Tahun 2019-2025



Sumber: BPS dan Kementan, Februari 2026

Komoditas beras no HS 10063099 “Beras selain setengah masak. 1/2 giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun

tidak” terbanyak diimpor pada tahun 2024 dan 2025 masing2 sebanyak 3.987.269.484 kg (sekitar 99,45% dari total volume impor beras 2024) dengan nilai US\$ 2.419.165.614 dan 74.976.519 kg (sekitar 87% dari total volume impor beras tahun 2025) dengan nilai US\$ 40.096.183. Pada tahun 2026, Kementerian Pertanian menargetkan angka produksi padi mencapai 60,34 juta ton GKG setara dengan 34,77 juta ton beras.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian menunjukkan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Januari - Desember 2025 mencapai 16,17 juta ton, meningkat 1,02 juta ton atau 6,74 persen dibandingkan produksi tahun 2024 yang sebesar 15,15 juta ton. Menurut Badan Pangan Nasional, kebutuhan/ konsumsi Jagung Pipilan kering (JPK) 14 persen selama 2025 berada di kisaran 15,64 juta ton, maka produksi yang melampaui kebutuhan sehingga terdapat surplus sekitar 0,47 juta ton. Target produksi jagung yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian tahun 2026 mencapai 22,70 juta ton (KA 28%) dan 16,77 juta ton (KA 14%).

Selain itu, impor jagung untuk kebutuhan industri pangan juga menunjukkan penurunan signifikan. Jika sebelumnya mencapai sekitar 1,4 juta ton, kini turun menjadi sekitar 800 ribu ton, menandakan semakin kuatnya kemampuan produksi dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan nasional. Produksi meningkat karena adanya program perluasan

tanam jagung sehingga luas panen 2024 sebesar 2,55 juta ha pada tahun 2025 meningkat menjadi 2,72 juta ha, terjadi peningkatan 6,67% atau 0,17 juta ha.

Nomor HS 10059091 “Selain jagung brondong. layak untuk dikonsumsi manusia” merupakan nomor HS jagung yang paling banyak diimpor pada tahun 2024 dan 2025 dibandingkan nomor HS jagung lainnya. Pada tahun 2024 volume impor tercatat sebesar 1.490.369.542 kg (sekitar 74% dari total impor jagung) dengan nilai US\$ 366.559.956 sedangkan pada tahun 2025 volume impor sebesar 887.884.843 kg (sekitar 90% dari total volume impor jagung) dengan nilai impor US\$ 222.208.459.

Volume impor kedelai tahun 2025 meningkat 5,03% dibandingkan tahun 2024. Nomor HS yang paling banyak diimpor adalah “Kacang kedelai. pecah maupun tidak. selain untuk benih” (HS 12019000) dengan volume 2.676.302.666 kg (33% dari total impor kedelai tahun 2024) dengan nilai US\$ 1.402.568.690. Sedangkan pada tahun 2025 volume impor nomor HS ini tercatat 2.558.207.263 kg (30% dari total impor kedelai tahun 2025) dengan nilai US\$ 1.187.149.993,19.

Permasalahan kedelai di Indonesia saat ini adalah semakin berkurangnya produksi kedelai dalam negeri sehingga masih mengandalkan kedelai impor untuk produksi olahan kedelai seperti tahu dan tempe. Produksi kedelai di Indonesia tahun 2024 sebesar 230,21 ribu ton biji kering (angka harmonisasi antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian) dan produksi tahun 2025 diperkirakan stagnan. Kebutuhan kedelai di Indonesia tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,66 juta ton (Proyeksi Neraca Pangan – Badan Pangan Nasional 2025). Tingginya tingkat kebutuhan akan kedelai di Indonesia menyebabkan tingginya kebutuhan akan impor. Kementerian Pertanian menetapkan target produksi tahun 2026 mencapai 381.000 ton.

Negara Asal Impor Utama Komoditi Gandum, Kedelai, Beras Dan Jagung

Pada tahun 2025, Indonesia paling banyak mengimpor gandum dari Australia (40%), Canada (20%) dan Ukraina (12%). Beras paling banyak diimpor dari India (41%), Vietnam (24%), Thailand dan Pakistan (14%). Jagung paling banyak diimpor dari Argentina (47%), USA (27%) dan Brazil (17%). Sedangkan kedelai dominan diimpor dari Brazil (45%), USA (28%) dan Argentina (22%).

Peranan PISAgro mendukung Program Pemerintah

Kebijakan Kementerian Pertanian terkait jagung pada tahun 2026 difokuskan pada pencapaian swasembada jagung melalui peningkatan produksi yang masif, penghentian impor, dan perlindungan harga bagi petani. Hal ini tertulis dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026-2029. Inpres dimaksud memuat petunjuk Presiden untuk melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri sepanjang tahun 2026. Target pengadaannya 1 juta ton dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 5.500 per kilogram (kg) dengan kriteria jagung yang telah masuk usia panen dan kadar air antara 18 sampai 20 persen. Pengadaan jagung dalam negeri yang dimaksud dalam Inpres ditugaskan kepada Perum Bulog untuk penguatan stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Diharapkan anggota PISAgro dapat mendukung program swasembada jagung dengan beberapa cara:

- Penyediaan Teknologi dan Benih Unggul: Swasta berperan penting dalam pengembangan dan distribusi benih jagung hibrida unggul yang menjadi kunci peningkatan produktivitas.
- Investasi dan Infrastruktur: Pihak swasta berkontribusi dalam permodalan dan penyediaan sarana produksi pertanian

(saprodi), seperti pupuk dan mesin pertanian modern (*combined harvester*).

- Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran: Perusahaan swasta mendorong hilirisasi, termasuk pemanfaatan hasil samping jagung (seperti bonggol jagung) untuk diekspor.
- Kemitraan dan Edukasi Petani: Melalui keterlibatan dalam penanaman serentak, swasta membantu petani dalam penerapan teknik budidaya yang lebih efektif.

Analysis of Indonesia's Agricultural Commodity Imports' Data Between 2024 & 2025

Ferial Lubis (This article is written and compiled from datas from Ministry of Agriculture and Statistics Indonesia/BPS)



Food crops remained the most imported subsector compared to plantation crops, horticulture, and livestock. In 2024, the share of food crop import volume reached 73% of the total import volume of the four subsectors. In 2025, this share declined slightly to 71%.

The import volume of the food crops subsector in 2025 decreased by 19.20% compared to 2024, while the plantation subsector declined by 22.29%. However, import volumes in the horticulture and livestock subsectors increased by 10.11% and 6.35% respectively in 2025 compared to 2024.

Table 1. Agricultural Sector Import Data 2024–2025

No	Commodity	2024		2025		Growth (%)	
		Volume (kg)	Value (US\$)	Volume (kg)	Value (US\$)	Vol	Value
1	Food Crops	27,885,599,916	11,825,671,775	22,531,775,914	7,982,345,613	-19.20	-32.50
2	Estate Crops	6,682,007,694	7,605,135,340	5,192,670,117	7,161,796,331	-22.29	-5.83
3	Horticulture	1,900,288,950	3,119,948,551	2,092,383,847.70	3,337,192,764.04	10.11	6.96
4	Livestock	1,983,844,927	4,665,761,556	2,109,847,549.77	5,152,200,182.87	6.35	10.43
Total Agricultural Imports		38,451,741,487	27,216,517,222	31,926,677,429	23,633,534,890		
Share FC/Total (%)		73	43	71	34		
Source: Pusdatin, Ministry of Agriculture and BPS, processed by PISAgro							



Wheat, Soybeans, Rice, and Corn Were the Highest Imported Food Crop Commodities

Based on import data for the food crops subsector, the largest import volumes came from wheat, soybeans, rice, and corn. Wheat imports in 2024 accounted for 46% of the combined imports of these four commodities. Compared to total food crop imports, wheat imports represented 44%, and compared to total agricultural imports, they represented 32%.

In 2025, wheat import volume accounted for 55% of the combined import volume of the four commodities, 52% of total food crop import volume, and 37% of total agricultural commodity imports. This indicates that Indonesia's dependence on wheat commodities remains relatively high.

The HS code "Wheat and meslin without husk" (HS 10019912) was the most imported wheat commodity in both 2024 and 2025, amounting to 9,187,552,520 kg

(around 75% of total wheat import volume in 2024) valued at US\$ 2,758,222,495, and 10,230,121,495 kg (around 87% of total wheat import volume in 2025) valued at US\$ 2,870,709,893.

According to experts, sorghum is a local commodity with strong potential to replace wheat and reduce imports. Sorghum is superior because it is drought-resistant, high in fiber, and gluten-free. In addition, cassava and sago can also be utilized as alternative carbohydrate sources. Sorghum is cultivated in dryland areas such as East Nusa Tenggara (NTT) and can be processed into flour for noodles and bread, while also being rich in fiber and iron. Cassava can be processed into tapioca flour or mocaf flour (Modified Cassava Flour) as a substitute for wheat flour. Sago also has strong potential as a primary carbohydrate source, especially in Eastern Indonesia, where it can be processed into sago flour.

Table 2. Share of Import Volume and Value of Major Food Crop Commodities Compared to Total Food Crop Imports and Total Agricultural Imports (%)

No	Commodity	2024		2025	
		Volume (kg)	Value (US\$)	Volume (kg)	Value (US\$)
1	Wheat/Meslin	12,262,861,461	3,683,690,628	11,758,770,304	3,337,162,795
2	Soybeans	8,192,713,565	4,055,232,394	8,605,092,756	3,513,665,753
3	Rice	4,009,393,185	2,437,595,589	86,100,559	50,496,674
4	Corn	2,013,419,016	566,258,271	982,110,227	267,547,078
5	Total Imports 1-4	26,478,387,227	10,742,776,882	21,432,073,846	7,168,872,300
6	Total Food Crop Imports	27,885,599,916	11,825,671,775	22,531,775,914	7,982,345,613
7	Total Agricultural Imports	38,451,741,487	27,216,517,222	31,926,677,429	23,633,534,890
8	1/5 (%)		46.31		54.87
9	1/6 (%)		43.98		52.19
10	1/7 (%)		31.89		36.83

Source: Pusdatin Ministry of Agriculture and BPS processed by PISAgro

The commodities that experienced the sharpest decline in import volume in 2025 compared to 2024 were rice and corn. Rice import volume decreased by 97.85%, with

import value declining by 97.93%, while corn import volume decreased by 51.22%, with import value falling by 52.75%.

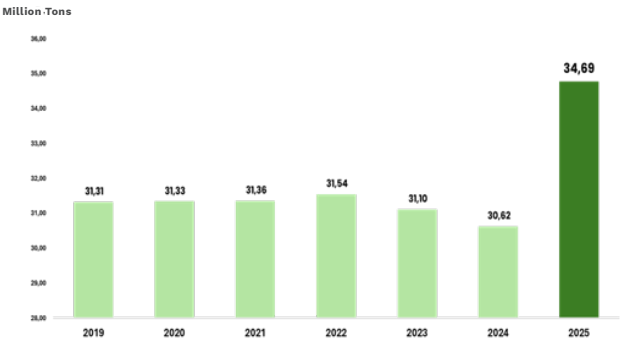
Table 3. Growth in Import Volume and Value of Major Food Crop Commodities in 2024 & 2025

No	Commodity	2024	2025	Growth	2024	2025	Growth
		Volume (kg)	Volume (kg)	(%)	Value (US\$)	Value (US\$)	(%)
1	Wheat/Meslin	12.262.861.461	11.758.770.304	-4,11	3.683.690.628	3.337.162.795	-9,41
2	Soybeans	8.192.713.565	8.605.092.756	5,03	4.055.232.394	3.513.665.753	-13,35
3	Rice	4.009.393.185	86.100.559	-97,85	2.437.595.589	50.496.674	-97,93
4	Corn	2.013.419.016	982.110.227	-51,22	566.258.271	267.547.078	-52,75
Source: Pusdatin Ministry of Agriculture and BPS processed by PISAgro							

This decline occurred because rice production from January–December 2025 reached 34.69 million tons, increasing by 13.29% (4.07 million tons) compared to January–December 2024 production of 30.62 million tons. This was also supported by strong Government Rice Reserve (CBP) stocks, which increased by 221% over the past two years. In addition, weather conditions in 2025 were better than in 2024, reducing the impact of drought caused by El Niño, resulting in more productive harvests. Consequently, throughout 2025, medium-quality rice imports practically ceased, with imports focused only on specific categories such as broken rice for industrial purposes.

rice, whether or not polished or glazed,” was the most imported rice commodity in both 2024 and 2025, amounting to 3,987,269,484 kg (around 99.45% of total rice import volume in 2024) valued at US\$ 2,419,165,614, and 74,976,519 kg (around 87% of total rice import volume in 2025) valued at US\$ 40,096,183. In 2026, the Ministry of Agriculture targets rice production to reach 60.34 million tons of harvested dry paddy (GKG), equivalent to 34.77 million tons of rice.

Chart 1. Development of Domestic Rice Production 2019–2025



Source: Statistics Indonesia (BPS) and Ministry of Agriculture, February 2026

The rice commodity under HS code 10063099, “Rice other than semi-milled or wholly milled

Data from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Agriculture show that dry shelled corn production with 14% moisture content from January–December 2025 reached 16.17 million tons, an increase of 1.02 million tons or 6.74% compared to 2024 production of 15.15 million tons. According to the National Food Agency, demand/consumption of dry shelled corn (JPK) with 14% moisture content during 2025 was estimated at around 15.64 million tons, resulting in a surplus of approximately 0.47 million tons. The corn production target set by the Ministry of Agriculture for 2026 is 22.70 million tons (28% moisture content) and 16.77 million tons (14% moisture content).

In addition, corn imports for the food industry also showed a significant decline. Previously reaching around 1.4 million tons, imports have now decreased to around 800 thousand tons, indicating the strengthening capacity of domestic production to meet national demand. Production increased due to the corn planting expansion program, where harvested

area increased from 2.55 million hectares in 2024 to 2.72 million hectares in 2025, an increase of 6.67% or 0.17 million hectares.

HS code 10059091, “Other than popcorn, suitable for human consumption,” was the most imported corn HS code in both 2024 and 2025 compared to other corn HS codes. In 2024, import volume reached 1,490,369,542 kg (around 74% of total corn imports) valued at US\$ 366,559,956, while in 2025 import volume reached 887,884,843 kg (around 90% of total corn import volume) valued at US\$ 222,208,459.

Soybean import volume in 2025 increased by 5.03% compared to 2024. The most imported HS code was “Soybeans, whether or not broken, other than for sowing” (HS 12019000), with a volume of 2,676,302,666 kg (33% of total soybean imports in 2024) valued at US\$ 1,402,568,690. In 2025, import volume under this HS code reached 2,558,207,263 kg (30% of total soybean imports in 2025) valued at US\$ 1,187,149,993.19.

The current soybean issue in Indonesia is the continuing decline in domestic soybean production, resulting in dependence on imported soybeans for processed soybean products such as tofu and tempeh. Indonesia’s soybean production in 2024 reached 230.21 thousand tons of dry beans (harmonized figures between Statistics Indonesia and the Ministry of Agriculture), while production in 2025 is estimated to remain stagnant. Indonesia’s soybean demand in 2025 is projected to reach 2.66 million tons (Food Balance Projection – National Food Agency 2025). The high demand for soybeans in Indonesia has resulted in a high level of imports. The Ministry of Agriculture has set a production target of 381,000 tons for 2026.

Main Countries of Origin for Wheat, Soybean, Rice, and Corn Imports

In 2025, Indonesia imported the largest share of wheat from Australia (40%),

Canada (20%), and Ukraine (12%). Rice was mainly imported from India (41%), Viet Nam (24%), Thailand, and Pakistan (14%). Corn imports mainly came from Argentina (47%), the USA (27%), and Brazil (17%). Meanwhile, soybeans were predominantly imported from Brazil (45%), the USA (28%), and Argentina (22%).

The Role of PISAgro in Supporting Government Programs

The Ministry of Agriculture’s corn policy for 2026 focuses on achieving corn self-sufficiency through massive production increases, the cessation of imports, and price protection for farmers. This policy is outlined in Presidential Instruction (Inpres) Number 3 of 2026 concerning Domestic Corn Procurement and Management and the Distribution of Government Corn Reserves for 2026–2029.

The Presidential Instruction contains directives from the President to implement domestic corn procurement throughout 2026. The procurement target is 1 million tons with a Government Purchasing Price (HPP) of IDR 5,500 per kilogram for corn that has reached harvest age and has a moisture content between 18% and 20%. Domestic corn procurement under this Presidential Instruction is assigned to Perum Bulog to strengthen Government Corn Reserve (CJP) stocks.

PISAgro members are expected to support the corn self-sufficiency program through several approaches:

- **Provision of Technology and Superior Seeds:** The private sector plays an important role in developing and distributing superior hybrid corn seeds, which are key to increasing productivity.
- **Investment and Infrastructure:** The private sector contributes through financing and the provision of agricultural production facilities (saprodi), such as fertilizers and modern agricultural machinery (combined harvesters).

- **Increasing Added Value and Marketing:** Private companies encourage downstream processing, including the utilization of corn by-products (such as corn cobs) for export purposes.
- **Partnerships and Farmer Education:** Through involvement in simultaneous planting programs, the private sector helps farmers implement more effective cultivation techniques.

Lebih Dari Sekedar Musim Perayaan, Membangun Rantai Pasok Pangan yang Tangguh di Indonesia

Hendri Surya W. *(Artikel ini ditulis dan dirangkum dari berbagai sumber)*



Setiap tahun, periode Ramadan dan Idulfitri menjadi salah satu momentum paling penting dalam sistem pangan Indonesia. Permintaan terhadap berbagai komoditas pangan meningkat secara signifikan, mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, hingga cabai dan bawang. Aktivitas distribusi bergerak lebih intensif, pola konsumsi berubah, dan perhatian publik terhadap stabilitas harga pangan meningkat.

Namun di balik dinamika musiman tersebut, Ramadan juga menjadi “stress test” bagi rantai pasok pangan nasional. Periode ini memperlihatkan seberapa kuat koordinasi antar pelaku, seberapa siap sistem logistik bekerja di tengah lonjakan permintaan, serta seberapa adaptif sektor pangan menghadapi tekanan distribusi dan volatilitas harga.

Tahun demi tahun, pengalaman menghadapi Ramadan memberikan pelajaran penting bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga tentang bagaimana rantai pasok mampu menjaga stabilitas, keterjangkauan, dan ketersediaan pangan secara konsisten.

Ramadan Sebagai Ujian Ketahanan Rantai Pasok

Selama Ramadan, pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Permintaan pangan meningkat bukan hanya karena volume konsumsi, tetapi juga karena perubahan preferensi, kebutuhan industri makanan, serta aktivitas sosial yang lebih tinggi.

Dalam kondisi seperti ini, tantangan rantai pasok menjadi semakin kompleks. Distribusi harus berjalan lebih cepat, stok harus tersedia dalam jumlah cukup, dan koordinasi antar pelaku harus lebih presisi. Sedikit gangguan dalam distribusi dapat berdampak langsung pada lonjakan harga dan kepanikan pasar.

Meski demikian, pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia semakin mampu menjaga stabilitas pasokan pangan selama periode Ramadan dan Idulfitri melalui kombinasi koordinasi pemerintah, pelaku usaha, koperasi, petani, distributor, hingga sektor logistik. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan modern semakin bergantung pada kekuatan ekosistem rantai pasok secara keseluruhan, bukan hanya pada kapasitas produksi semata.

Pelajaran dari Lonjakan Permintaan Pangan

Momentum pasca-Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap sistem pangan nasional. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya visibilitas data dan transparansi rantai pasok.

Ketika permintaan meningkat tajam, kemampuan memantau stok, distribusi, dan pergerakan harga secara real-time menjadi semakin penting. Data bukan lagi sekadar alat pelaporan, tetapi fondasi dalam pengambilan keputusan yang cepat dan adaptif.

Selain itu, pengalaman selama Ramadan juga menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber pasokan dan penguatan distribusi lokal. Ketergantungan pada wilayah produksi tertentu dapat meningkatkan risiko ketika terjadi gangguan cuaca, hambatan logistik, atau keterlambatan distribusi.

Di sisi lain, koperasi, kelompok tani, dan pelaku usaha lokal terbukti memainkan

peran penting dalam menjaga kelancaran pasokan di tingkat daerah. Dalam banyak kasus, jejaring lokal menjadi faktor utama yang membantu menjaga stabilitas distribusi pangan.

Lebih Dari Sekedar Musim Perayaan: Ketahanan yang Dibangun Sepanjang Tahun

Tantangan terbesar setelah Ramadan adalah memastikan bahwa penguatan rantai pasok tidak berhenti sebagai respons musiman. Ketahanan rantai pasok perlu dibangun sebagai proses jangka panjang yang berlangsung sepanjang tahun.

Hal ini mencakup penguatan berbagai aspek, seperti infrastruktur logistik dan *cold chain*, sistem data dan ketertelusuran, kapasitas koperasi dan kelembagaan petani, digitalisasi distribusi dan perdagangan, diversifikasi sumber produksi pangan, serta penguatan kemitraan antar pelaku rantai pasok.

Dalam konteks ini, transformasi sistem pangan tidak lagi hanya berbicara tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang bagaimana membangun sistem distribusi yang lebih fleksibel, transparan, dan resilien terhadap berbagai tekanan global maupun domestik.

Kolaborasi Sebagai Fondasi Ketahanan

Pengalaman selama Ramadan juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu aktor yang dapat menjaga stabilitas pangan sendirian. Ketahanan rantai pasok hanya dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah berperan dalam koordinasi kebijakan dan stabilisasi pasar. Pelaku usaha memperkuat distribusi dan investasi rantai pasok. Koperasi dan kelompok tani menjaga konektivitas dengan produsen kecil. Sementara sektor teknologi membantu meningkatkan visibilitas data, efisiensi logistik, dan pengambilan keputusan berbasis informasi.

Pendekatan kolaboratif ini menjadi semakin penting di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, volatilitas geopolitik, gangguan perdagangan internasional, serta perubahan pola konsumsi masyarakat.

Smallholders dan Ketahanan Sistem Pangan

Di balik stabilitas pangan selama periode Ramadan, terdapat kontribusi besar jutaan petani kecil yang menjaga produksi tetap berjalan. Smallholders tidak hanya menjadi produsen pangan, tetapi juga fondasi utama ketahanan pangan nasional.

Namun, menjaga keberlanjutan peran petani kecil memerlukan dukungan yang lebih kuat terhadap akses pembiayaan, teknologi, pasar, serta perlindungan terhadap risiko produksi dan fluktuasi harga.

Karena itu, penguatan rantai pasok pangan juga harus berjalan seiring dengan penguatan kesejahteraan produsen di tingkat hulu. Sistem pangan yang tangguh tidak dapat dibangun jika petani tetap berada dalam posisi yang rentan.

Membangun Sistem yang Lebih Adaptif

Pasca-Ramadan menjadi momentum penting untuk melihat kembali bahwa ketahanan pangan bukan sekadar kemampuan bertahan dalam satu musim permintaan tinggi, tetapi kemampuan sistem untuk terus beradaptasi dalam jangka panjang.

Ke depan, Indonesia membutuhkan rantai pasok pangan yang lebih terintegrasi, berbasis data, inklusif terhadap petani kecil, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mampu merespons dinamika pasar secara cepat.

Transformasi ini memerlukan investasi bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kelembagaan, kolaborasi, dan kepercayaan antar pelaku rantai pasok.

Dari Stabilitas Musiman Menuju Ketahanan Jangka Panjang

Ramadan dan Idulfitri memberikan pelajaran penting bahwa sistem pangan bekerja paling baik ketika seluruh elemen rantai pasok bergerak secara terkoordinasi. Stabilitas yang terjaga selama periode permintaan tinggi bukanlah hasil kerja satu pihak, melainkan hasil kolaborasi seluruh ekosistem pangan.

Namun tantangan ke depan jauh lebih besar daripada sekadar menjaga pasokan selama musim perayaan. Indonesia perlu membangun sistem pangan yang mampu menghadapi krisis iklim, volatilitas pasar global, perubahan konsumsi, serta tekanan terhadap sumber daya alam.

Lebih dari sekadar perayaan, ketahanan pangan harus dipahami sebagai proses membangun rantai pasok yang lebih resilien, inklusif, dan berkelanjutan, bukan hanya untuk menghadapi Ramadan berikutnya, tetapi untuk memastikan masa depan pangan Indonesia dalam jangka panjang.

Dikutip dari berbagai sumber referensi:

1. *Badan Pangan Nasional – Outlook Pangan Indonesia; Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Ramadan-Idulfitri*
2. *Food and Agriculture Organization – The State of Food Security and Nutrition in the World; Food Supply Chain Resilience Framework*
3. *World Bank – Food System Resilience Program; Supply Chain and Food Security studies*
4. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Global Food*

5. *Bank Indonesia – Kajian Stabilitas Harga Pangan dan Inflasi Ramadan–Idulfitri*
6. *Kementerian Pertanian Republik Indonesia – Statistik Pertanian 2025; Laporan Ketahanan Pangan dan Distribusi Pangan*
7. *Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Harga Konsumen, Inflasi Pangan, dan Distribusi Perdagangan Indonesia*
8. *World Economic Forum – Food Systems Transformation and Supply Chain Resilience reports*

Beyond the Festive Season: Building Resilient Food Supply Chains in Indonesia

Hendri Surya W. *(This article is written and compiled from various sources)*



Every year, the Ramadan and Eid al-Fitr period becomes one of the most significant moments in Indonesia's food system. Demand for various food commodities rises substantially, ranging from rice, cooking oil, sugar, eggs, and chicken meat to chili peppers and onions. Distribution activities intensify, consumption patterns shift, and public attention toward food price stability increases.

Behind these seasonal dynamics, however, Ramadan also serves as a “stress test” for the national food supply chain. This period demonstrates how strong coordination among stakeholders truly is, how prepared the logistics system is in handling surging demand, and how adaptive the food sector can be in responding to distribution pressures and price volatility.

Year after year, the experience of navigating Ramadan offers important lessons that food security is not solely about production, but also about how supply chains can consistently maintain food availability, affordability, and stability.

Ramadan as a Test of Supply Chain Resilience

During Ramadan, public consumption patterns undergo significant changes. Food demand increases not only in volume, but also due to shifting preferences, growing food industry needs, and heightened social activities.

Under these conditions, supply chain challenges become increasingly complex. Distribution must move faster, stocks must

remain sufficient, and coordination among actors must become more precise. Even minor disruptions in distribution can directly trigger price spikes and market panic.

Nevertheless, experiences over recent years show that Indonesia has become increasingly capable of maintaining food supply stability during the Ramadan and Eid al-Fitr period through stronger coordination among the government, businesses, cooperatives, farmers, distributors, and the logistics sector. This demonstrates that modern food security increasingly depends on the strength of the entire supply chain ecosystem, not merely on production capacity alone.

Lessons from Food Demand Surges

The post-Ramadan period provides an important opportunity to reflect on the national food system. One of the key lessons learned is the importance of data visibility and supply chain transparency.

When demand rises sharply, the ability to monitor stocks, distribution, and price movements in real time becomes increasingly essential. Data is no longer merely a reporting tool, but rather the foundation for fast and adaptive decision-making.

In addition, experiences during Ramadan also highlight the importance of diversifying supply sources and strengthening local distribution systems. Dependence on specific production regions can increase risks when weather disruptions, logistical barriers, or distribution delays occur.

At the same time, cooperatives, farmer groups, and local business actors have proven to play vital roles in maintaining smooth supply flows at the regional level. In many cases, local networks become the primary factor in preserving food distribution stability.

Beyond the Festive Season: Building Resilience Throughout the Year

The greatest challenge after Ramadan is ensuring that supply chain strengthening does not stop as a seasonal response. Supply chain resilience must instead be built as a long-term process sustained throughout the year.

This includes strengthening multiple aspects such as logistics infrastructure and cold chains, data systems and traceability, cooperative and farmer institutional capacity, digitalization of distribution and trade, diversification of food production sources, and stronger partnerships among supply chain actors.

In this context, food system transformation is no longer only about increasing production, but also about building distribution systems that are more flexible, transparent, and resilient against both global and domestic pressures.

Collaboration as the Foundation of Resilience

Experiences during Ramadan also demonstrate that no single actor can maintain food stability alone. Supply chain resilience can only be achieved through cross-sector collaboration.

Governments play roles in policy coordination and market stabilization. Businesses strengthen distribution systems and supply chain investments. Cooperatives and farmer groups maintain connectivity with small producers. Meanwhile, the technology sector helps improve data visibility, logistical efficiency, and information-based decision-making.

This collaborative approach is becoming increasingly important amid global challenges such as climate change, geopolitical volatility, disruptions in international trade, and shifting consumer behavior.

Smallholders and Food System Resilience

Behind food stability during the Ramadan period lies the significant contribution of millions of smallholder farmers who keep production running. Smallholders are not only food producers, but also the fundamental backbone of national food security.

However, sustaining the role of smallholder farmers requires stronger support for access to financing, technology, markets, and protection against production risks and price fluctuations.

Therefore, strengthening food supply chains must go hand in hand with improving the welfare of upstream producers. Resilient food systems cannot be built if farmers remain in vulnerable positions.

Building a More Adaptive System

The post-Ramadan period serves as an important reminder that food security is not merely the ability to withstand a single season of heightened demand, but rather the capacity of the system to continuously adapt over the long term.

Moving forward, Indonesia requires food supply chains that are more integrated, data-driven, inclusive toward smallholder farmers, adaptive to climate change, and capable of responding rapidly to market dynamics.

This transformation requires investment not only in physical infrastructure, but also in institutions, collaboration, and trust among supply chain actors.

From Seasonal Stability Toward Long-Term Resilience

Ramadan and Eid al-Fitr offer important lessons that food systems function best

when all elements of the supply chain move in a coordinated manner. Stability maintained during periods of high demand is not the result of one actor alone, but rather the outcome of collaboration across the entire food ecosystem.

However, future challenges are far greater than simply maintaining supplies during festive seasons. Indonesia must build a food system capable of facing climate crises, global market volatility, shifting consumption patterns, and increasing pressure on natural resources.

Beyond the festive season, food resilience must be understood as a continuous process of building supply chains that are more resilient, inclusive, and sustainable, not only to prepare for the next Ramadan, but also to secure Indonesia's long-term food future.

Cited from Various Reference Sources:

1. *National Food Agency of Indonesia – Indonesia Food Outlook; Ramadan–Eid Food Supply and Price Stability reports*
2. *Food and Agriculture Organization – The State of Food Security and Nutrition in the World; Food Supply Chain Resilience Framework*
3. *World Bank – Food System Resilience Program; Supply Chain and Food Security studies*
4. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Global Food Supply Chains and Resilience; OECD–FAO Agricultural Outlook 2024–2033*
5. *Bank Indonesia – Food Price Stability and Ramadan–Eid Inflation studies*
6. *Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia – Agricultural Statistics 2025; Food Security and Food Distribution reports*
7. *Statistics Indonesia (BPS) – Consumer*

*Price Statistics, Food Inflation,
and Trade Distribution Statistics of
Indonesia*

8. *World Economic Forum – Food
Systems Transformation and Supply
Chain Resilience reports*

Perkuat Industri Pangan, Indofood Sukses Makmur Raih Sabet Penghargaan Bergengsi 2026

PISAgro, Indofood



PT Indofood Sukses Makmur Tbk dianugerahi *Indonesia's Best Food Resilience Leadership* dalam *Food Summit 2026*. Penganugerahan tersebut diselenggarakan oleh CNBC Indonesia di Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Capaian tersebut tidak lepas dari rekam jejak panjang perusahaan, daya tahan bisnis yang teruji, kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, serta kepemimpinan berkelanjutan di industri pangan.

Sebagaimana diketahui, Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan pangan terbesar di Indonesia yang telah melewati berbagai siklus ekonomi, perubahan perilaku konsumen, hingga tantangan rantai pasok global. Berbekal model bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir, Indofood

mempertegas posisinya sebagai korporasi yang tangguh, adaptif, dan relevan lintas generasi.

Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Mengusung visi sebagai *Total Food Solutions Company*, Indofood membangun kekuatan bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan kata lain, Indofood memulai dari produksi bahan baku, pengolahan, manufaktur, hingga distribusi ke pasar nasional dan internasional. Strategi bisnis itulah yang menjadikan Indofood sebagai pilar strategis industri pangan Indonesia.

Didirikan pada 1990 dan berakar dari berbagai bisnis yang telah berjalan sejak awal 1980-an,

Indofood berkembang menjadi pemimpin pasar di Tanah Air. Indofood juga didukung oleh empat kelompok usaha strategis utama, yakni *Consumer Branded Products*, *Bogasari*, *Agribusiness*, dan *Distribution*.

Struktur bisnis yang saling melengkapi tersebut menciptakan skala ekonomi yang kuat serta daya tahan tinggi di tengah dinamika pasar global.

Beragam Merek di Sektor Produk Konsumen

Di sektor produk konsumen, Indofood menghadirkan berbagai merek yang telah menjadi ikon rumah tangga Indonesia. Di antaranya adalah Indomie, Supermi, Sarimi, Pop Mie, Indomilk, Chitato, Qtela, Chiki, hingga Ichi Ocha dan Club. Portofolio Indofood di sektor produk konsumen mampu menjangkau hampir seluruh segmen kebutuhan masyarakat sekaligus membentuk kedekatan emosional lintas generasi dengan konsumen Indonesia.

Sebagai contoh, Indomie sebagai merek andalan Indofood telah menjelma menjadi fenomena global. Dengan jaringan produksi di berbagai negara dan kapasitas produksi miliaran bungkus per tahun, Indomie sukses menempatkan Indofood sebagai pemain dunia asal Indonesia yang sanggup bersaing di pasar internasional. Kesuksesan tersebut memperlihatkan kemampuan Indofood dalam membawa cita rasa lokal menjadi kekuatan global.

Fondasi yang Kuat di Sektor Hulu

Di sektor hulu, Indofood melalui Bogasari telah menjadi produsen tepung terigu dan pasta terbesar yang menopang rantai pasok industri makanan nasional. Sementara itu, Indofood turut mengelola rantai usaha terintegrasi di lini agribisnis, mulai dari riset benih, perkebunan kelapa sawit, pengolahan minyak goreng, margarin, shortening, hingga diversifikasi

komoditas lain seperti tebu dan karet. Hal ini menjadikan Indofood memiliki fondasi produksi yang kuat dan mandiri.

Lebih jauh, Indofood juga menjadi salah satu pemilik jaringan distribusi paling luas di Indonesia, sehingga memungkinkan produknya menjangkau kota besar sampai daerah terpencil. Keunggulan ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan pangan rumah tangga, mendukung perdagangan domestik, serta memperkuat konektivitas ekonomi nasional. Hanya ada sedikit perusahaan yang memiliki kemampuan distribusi dengan skala dan kedalaman seperti Indofood.

Tak hanya kekuatan bisnis, Indofood juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap tata kelola dan keberlanjutan melalui berbagai sertifikasi internasional, mulai dari keamanan pangan, kualitas mutu, efisiensi energi, kesehatan dan keselamatan kerja, hingga standar lingkungan dan keberlanjutan kelapa sawit.

Sumber: CNBC Indonesia

Strengthening the Food Industry, Indofood Sukses Makmur Wins Prestigious 2026 Award

PISAgro, Indofood



PT Indofood Sukses Makmur Tbk was awarded the Indonesia's Best Food Resilience Leadership at the Food Summit 2026. The award ceremony was organized by CNBC Indonesia in Jakarta on Monday (27/4/2026).

This achievement is inseparable from the company's long-standing track record, proven business resilience, significant contribution to the national economy, and sustainable leadership within the food industry.

As widely known, Indofood Sukses Makmur is one of the largest food companies in Indonesia that has successfully navigated various economic cycles, changing consumer behavior, and global supply chain challenges. Through its integrated upstream-to-downstream business model, Indofood has

strengthened its position as a resilient, adaptive, and cross-generational corporation.

Integrated from Upstream to Downstream

Carrying the vision of becoming a Total Food Solutions Company, Indofood has built an integrated business ecosystem spanning from upstream to downstream operations. In other words, Indofood manages everything from raw material production, processing, manufacturing, to distribution across domestic and international markets. This business strategy has positioned Indofood as a strategic pillar of Indonesia's food industry.

Established in 1990 and rooted in several businesses that had operated since the early

1980s, Indofood has grown into a market leader in Indonesia. The company is supported by four main strategic business groups: Consumer Branded Products, Bogasari, Agribusiness, and Distribution.

This complementary business structure creates strong economies of scale and high resilience amid the dynamics of the global market.

Diverse Brands in the Consumer Products Sector

In the consumer products sector, Indofood offers a wide range of brands that have become household icons in Indonesia. These include Indomie, Supermi, Sarimi, Pop Mie, Indomilk, Chitato, Qtela, Chiki, as well as Ichi Ocha and Club. Indofood's consumer products portfolio reaches almost every segment of public needs while also creating emotional connections across generations of Indonesian consumers.

For example, Indomie, as Indofood's flagship brand, has evolved into a global phenomenon. With production networks in multiple countries and a production capacity reaching billions of packs annually, Indomie has successfully positioned Indofood as a global player from Indonesia capable of competing in international markets. This success demonstrates Indofood's ability to transform local flavors into global strengths.

Strong Foundations in the Upstream Sector

In the upstream sector, Indofood, through Bogasari, has become one of the largest flour and pasta producers supporting the national food industry supply chain. Meanwhile, Indofood also manages an integrated agribusiness value

chain, ranging from seed research, oil palm plantations, cooking oil processing, margarine, shortening production, to diversification into other commodities such as sugarcane and rubber. This has provided Indofood with a strong and self-sufficient production foundation.

Furthermore, Indofood owns one of the widest distribution networks in Indonesia, enabling its products to reach major cities as well as remote areas. This advantage is crucial in maintaining household food availability, supporting domestic trade, and strengthening national economic connectivity. Only a few companies possess distribution capabilities with the same scale and depth as Indofood.

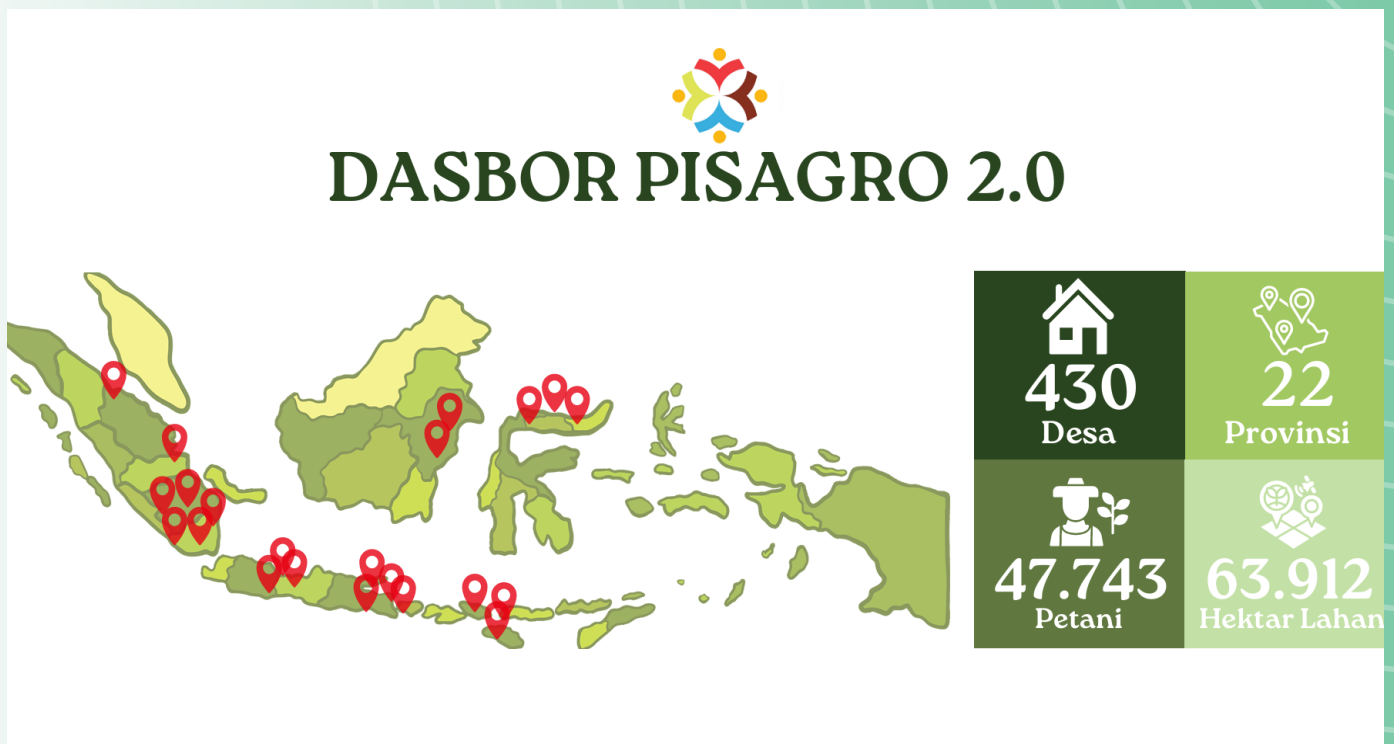
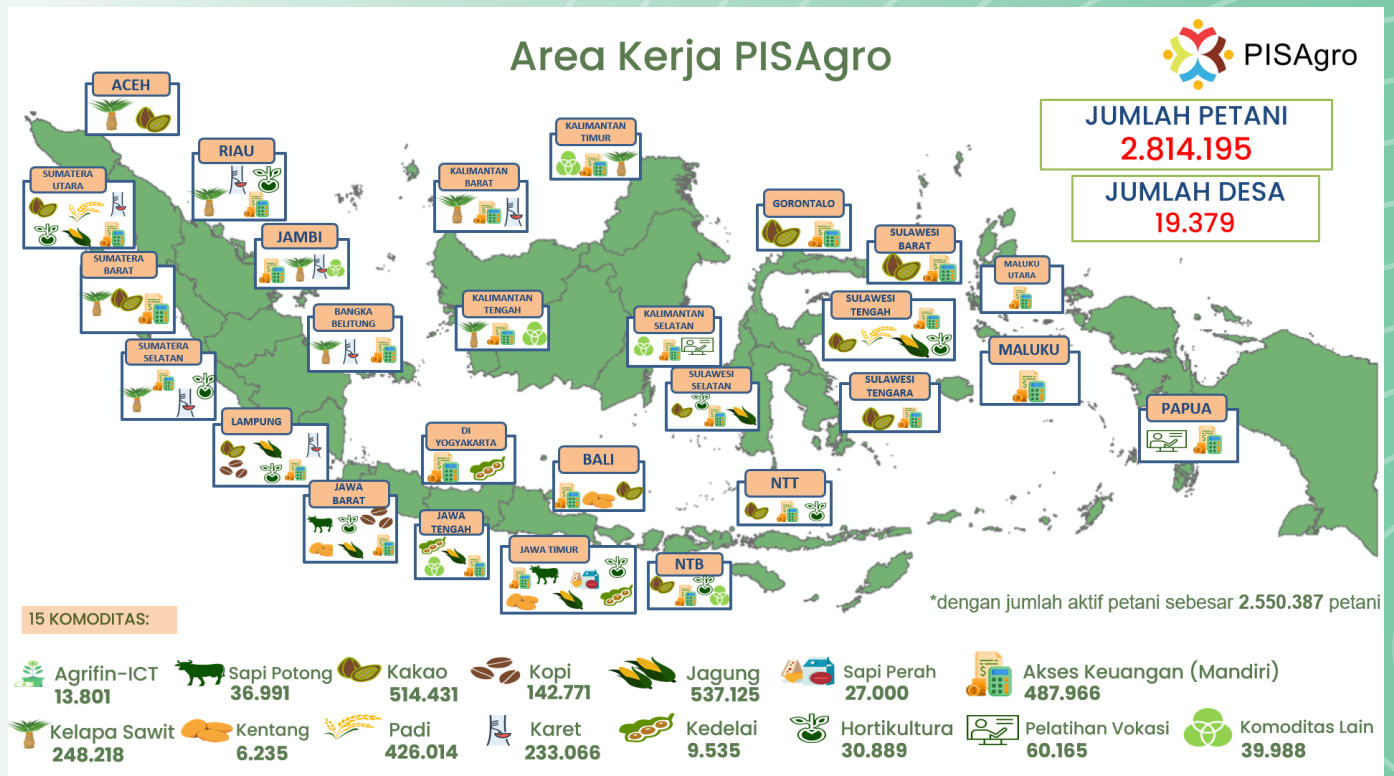
Beyond its business strength, Indofood has also demonstrated a strong commitment to governance and sustainability through various international certifications, covering food safety, quality standards, energy efficiency, occupational health and safety, as well as environmental and sustainable palm oil standards.

Source: CNBC Indonesia

Sorotan

Capaian Dasbor PISAgro 2.0 Saat Ini - April 2026

William Widjaja



TINJAUAN

PERTUMBUHAN

47% Petani memiliki akses ke **Bantuan Finansial**

97% Dari total hasil panen petani **dibeli langsung** oleh perusahaan

46% Petani berpartisipasi dalam **Lembaga Koperasi**



www.pisagro.org

KETAHANAN

40% Petani telah menerapkan **Adaptasi Iklim**



setidaknya **2** Fasilitas Kesehatan yang beroperasi dan **didukung** Perusahaan di desa

35% Petani menerapkan praktik **mitigasi bencana**



contact@pisagro.org

KEBERLANJUTAN

82% Dari keseluruhan lahan telah bermitra untuk menerapkan **manajemen lahan berkelanjutan**

100% ha lahan dipupuk dengan penerapan **Praktik Pertanian yang Baik**

789

Aktivitas (Sosialisasi, Kampanye, Pelatihan) **diadakan Perusahaan untuk mendukung** petani menerapkan manajemen limbah.



PISAgro

PERTUMBUHAN

47% Petani memiliki akses ke **Bantuan Finansial**

97% Dari total hasil panen petani **dibeli langsung** oleh perusahaan

46% Petani berpartisipasi dalam **Lembaga Koperasi**



www.pisagro.org

48% Petani menerapkan **Praktik Pertanian yang Baik (GAP)**

Pendapatan rata-rata petani per bulan:



Rp 4,2 Juta



Rp 5 Juta



Rp 9 juta



contact@pisagro.org



PISAgro

KETAHANAN

40%

Petani telah menerapkan
Adaptasi Iklim

35%

Petani menerapkan praktik
mitigasi bencana



at least
2

Fasilitas Kesehatan yang
beroperasi dan **didukung**
Perusahaan di desa

Upaya dorongan tentang kesehatan
secara total dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan,



366

**1-2 kali setahun*

Kegiatan meliputi Sosialisasi,
Kampanye, Pelatihan, dan Program
Langsung



www.pisagro.org



contact@pisagro.org



PISAgro

KEBERLANJUTAN

82%

Dari keseluruhan lahan telah bermitra
untuk menerapkan **manajemen**
lahan berkelanjutan

Aktivitas (Sosialisasi, Kampanye, Pelatihan) **diadakan**
Perusahaan untuk mendukung petani menerapkan
manajemen limbah.



418

Aktivitas

Upaya Pengelolaan Limbah yang Diadakan oleh
Perusahaan:



287

Sosialisasi



266

Kampanye



236

Pelatihan

100%



ha lahan telah dipupuk dengan penerapan
Praktik Pertanian yang Baik



www.pisagro.org



contact@pisagro.org

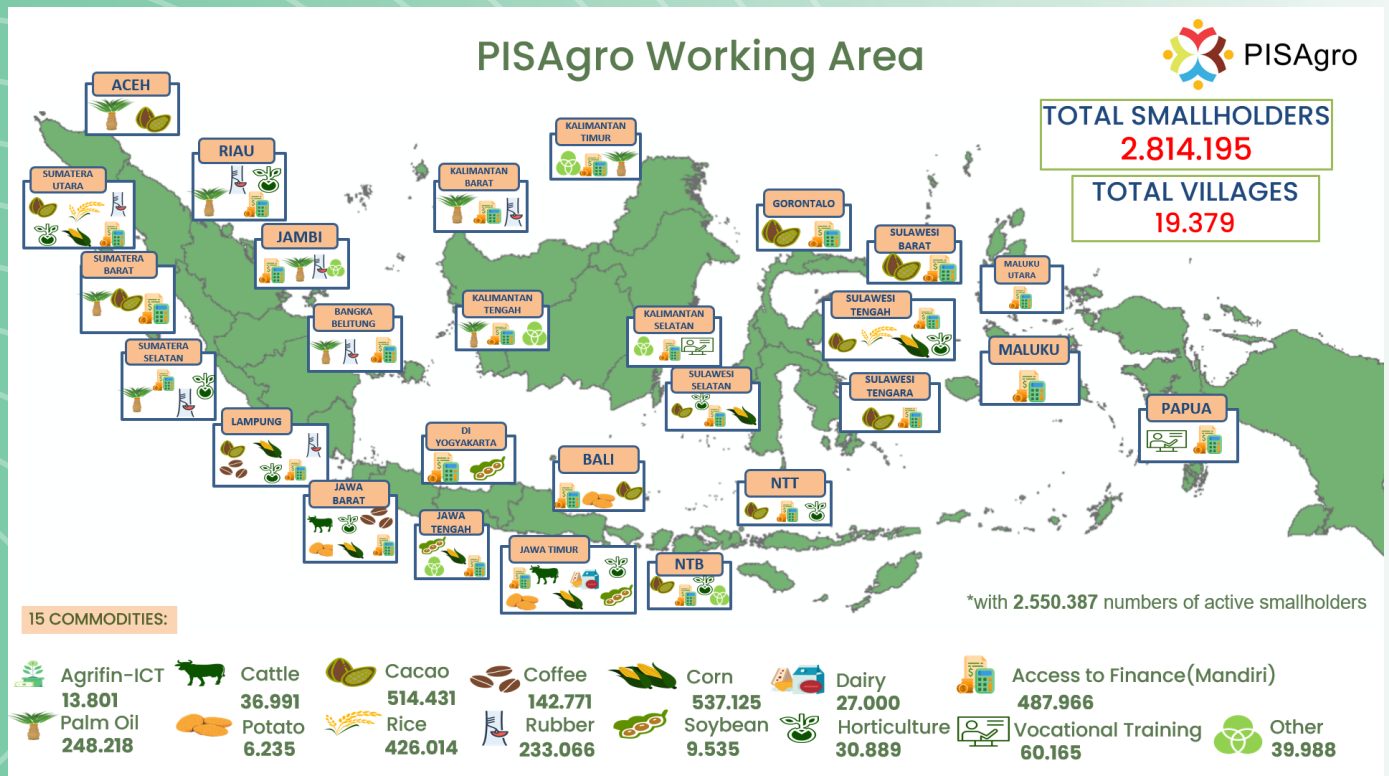


PISAgro

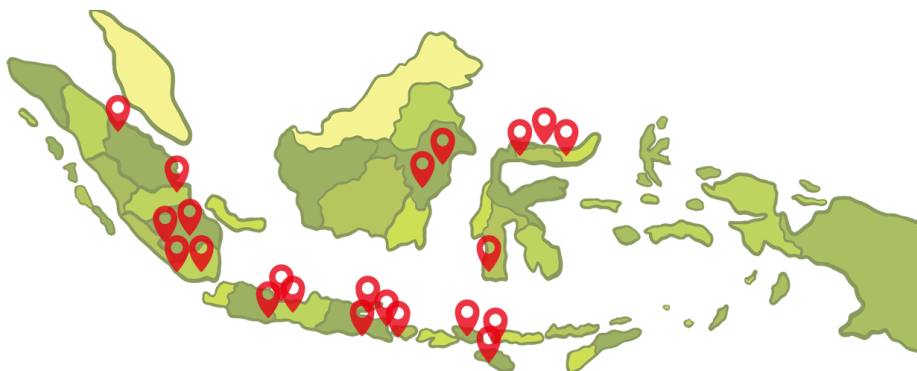
Highlights

Achievement of PISAgro 2.0 Dashboard - April 2026

William Widjaja



PISAGRO DASHBOARD 2.0



 430 Villages	 22 Province
 47.743 Smallholders	 63.912 Ha of Land

OVERVIEW

GROWTH

47% Smallholders have access to **Finance**

97% of Smallholders harvest sold to **partnered companies**

46% Smallholders participated in **Cooperatives**



www.pisagro.org

RESILIENCE

40% Smallholders implemented **Adaptation** already **Climate**



at least 2 Health facilities operated in each village **supported by company**

35% of smallholders are implemented act of **prevention on calamity**



contact@pisagro.org

SUSTAINABILITY

82% of total land are under partnership implementation of **land sustainable management**

100% ha of land fertilized under implementation of **Good Agriculture Practice**

789

Activites (Socialization, Campaign, Training) **conducted by company to support** smallholders implement management waste.



PISAgro

GROWTH

47% Smallholders have access to **Finance**

97% of Smallholders harvest sold to **partnered companies**

46% Smallholders participated in **Cooperatives**



www.pisagro.org



contact@pisagro.org

48% of Smallholders implemented **Good Agricultural Practice (GAP)**

Smallholders average income per month:



4.2 Million IDR



5 Million IDR



9 Million IDR



PISAgro

RESILIENCE

40%

Smallholders already implemented **Climate Adaptation**

35%

of smallholders are implemented act of **prevention on calamity**



at least

2

Health facilities operated in each village **supported by company**

Encouragement efforts about health in total were conducted by the companies,



366

**1-2 times a year*

Activities including Socialization, Campaign, Training, and Direct Program



www.pisagro.org



contact@pisagro.org



PISAgro

SUSTAINABILITY

82%

of total land are under partnership implementation of **land sustainable management**

Activites (Socialization, Campaign, and Training) **conducted by company to support** smallholders in Land Management,



418

Activities

Waste Management Effort Conducted by Company:



287

Socialization



266

Campaign



236

Training

100%



Ha of land fertilized by implementing **Good Agricultural Practice**



www.pisagro.org



contact@pisagro.org



PISAgro

Sorotan

1. Peluncuran Studi Oxford Economics

Saat ini, semakin besarnya peran sektor *agri-food* dalam mendukung penciptaan lapangan kerja, menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional menjadi perhatian penting di tengah dinamika ekonomi regional dan global. Forum ini juga mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asosiasi, dan akademisi untuk membahas bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi sektor *agri-food* sebagai penggerak pertumbuhan yang lebih inklusif dan resilien. Dalam konteks tersebut, *Food Industry Asia* (FIA) dan *ASEAN Food & Beverage Alliance* (AFBA) menyelenggarakan peluncuran laporan bertajuk “The Economic Impact of the Agri-Food Sector in Indonesia: Economic Insights – Unlocking Indonesia’s Agri-Food Powerhouse” pada 1 April 2026 di Habitate Jakarta. Forum ini menjadi momentum peluncuran studi terbaru Oxford Economics 2026 yang menyoroti kontribusi sektor *agri-food* terhadap perdagangan, investasi, daya saing, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih luas.

Acara dibuka dengan welcoming remarks dari Matt Kovac selaku *Senior Advisor & Board Member* AFBA, dilanjutkan dengan *scene setting speech* dari *Deputy Secretary General ASEAN Economic Community*, Satvinder Singh, yang menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional dalam sektor pangan dan pertanian di ASEAN.

Dalam sesi *keynote*, Bappenas melalui Leonardo A.A. Teguh Sambodo memaparkan visi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi sistem pangan berbasis *agritech* dan industrialisasi. Disampaikan bahwa sektor *agri-food* memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing nasional, sehingga diperlukan penguatan investasi, reformasi kebijakan, dan kolaborasi multipihak.

Sementara itu, Sekretariat ASEAN melalui Dr. Pham Quang Minh menyoroti *ASEAN Strategic Plan of Action for Cooperation in Food and Agriculture Sector*, khususnya terkait fasilitasi perdagangan, integrasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, keamanan pangan, serta distribusi pangan yang lebih merata di kawasan.

Presentasi utama mengenai hasil studi Oxford Economics disampaikan oleh James Lambert selaku *Director for Economics Consulting in Asia*, Oxford Economics. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa sektor *agri-food* Indonesia memiliki kontribusi yang semakin signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dalam penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, maupun penguatan rantai pasok domestik dan regional. Studi ini juga menyoroti pentingnya investasi pada infrastruktur, produktivitas, teknologi, dan efisiensi rantai pasok untuk menjaga daya saing sektor ke depan.

Forum juga menghadirkan sesi *industry sharing* oleh Ketua GAPMMI, Adhi Lukman, yang menyoroti kontribusi nyata industri pangan dan minuman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus tantangan yang masih dihadapi terkait perdagangan, infrastruktur pangan, logistik, dan efisiensi rantai pasok.

Diskusi panel bertajuk “Industry Pathways to a More Competitive and Resilient Agri-Food Economy” mempertemukan perwakilan industri, akademisi, dan pemerintah untuk membahas strategi penguatan rantai pasok, peningkatan produktivitas, serta respons terhadap dinamika pasar dan perubahan pola konsumsi. Diskusi ini menegaskan bahwa daya tahan sektor *agri-food* tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh kemampuan membangun ekosistem rantai pasok yang lebih terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap perubahan global.

PISAgro turut hadir dalam forum ini dan diwakili oleh Bapak Insan Syafaat selaku Direktur Eksekutif PISAgro. Kehadiran PISAgro

menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat transformasi sistem pangan Indonesia yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan. Forum ini juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat pertukaran perspektif antara sektor swasta, pemerintah, asosiasi, dan mitra pembangunan dalam mendorong masa depan sektor agri-food Indonesia yang lebih kompetitif di tingkat regional maupun global.

2. Lokakarya Pertanian Regeneratif PISAgro



Penguatan kolaborasi dalam menghadapi tantangan sistem pangan PISAgro melalui *Regenerative Agriculture Working Group* menyelenggarakan PISAgro's Regenerative Agriculture Workshop bertajuk "Establishing a Baseline Definition and Core Components of Regenerative Agriculture" pada 6 April 2026 di Grha Unilever, BSD City. Lokakarya ini menjadi ruang kolaborasi multipihak yang mempertemukan sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku industri untuk membangun pemahaman bersama mengenai pertanian regeneratif di Indonesia, sekaligus memperkuat peran sektor pertanian dan pangan dalam mendukung ketahanan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi sistem pangan yang lebih tangguh dan resilien.

Kegiatan dibuka oleh Ibu Nurdiana Darus selaku *Regenerative Agriculture Working Group Leader* yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi pertanian Indonesia. Beliau menyoroti tantangan sektor pertanian seperti degradasi tanah, perubahan iklim, dan tekanan terhadap sumber daya alam, serta menyampaikan bahwa anggota PISAgro telah mulai menerapkan praktik regeneratif dengan cakupan 130.000 hektare dan target mencapai 1 juta hektare pada 2030.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Mr. Ross Jaax yang menekankan bahwa pertanian regeneratif tidak hanya berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga pada pemulihan kesehatan tanah, biodiversitas, pengelolaan air, dan penguatan mata pencaharian petani. Beliau juga menyoroti pentingnya sistem data dan pengukuran seperti MRV untuk mendukung implementasi praktik regeneratif di Indonesia.

Pada sesi utama, Bapak Sarvesh Singh membahas meningkatnya perhatian global terhadap pertanian regeneratif serta peluang Indonesia dalam mempercepat transformasi sistem pangan melalui pendekatan regeneratif, meskipun masih menghadapi tantangan seperti pembiayaan, sertifikasi, infrastruktur, dan keterbatasan data. Ia juga menyoroti peluang pengembangan agroforestri, bio-input lokal, pembiayaan karbon, dan sistem digital.

Workshop turut menghadirkan panel diskusi bersama Prof. Dr. Ir. Herdhata Agusta, Rahmad Supriyanto, dan Edy Hartono yang membahas implementasi pertanian regeneratif di Indonesia. Diskusi menyoroti pentingnya kesehatan tanah, efisiensi input, pemanfaatan biomassa lokal, penguatan kebijakan, serta pengalaman penerapan praktik regeneratif pada sektor kelapa sawit rakyat.

Diskusi bersama peserta juga menghasilkan berbagai masukan terkait

definisi, indikator, dan praktik pertanian regeneratif yang relevan untuk Indonesia, termasuk kesehatan tanah, biodiversitas, pengelolaan air, pengurangan emisi, kesejahteraan petani, serta pentingnya insentif ekonomi dan akses pembiayaan.

Workshop ditutup oleh Direktur Eksekutif PISAgro, Bapak Insan Syafaat, yang menekankan pentingnya penyusunan definisi bersama dan komponen prioritas pertanian regeneratif sebagai dasar aksi kolektif dan advokasi ke depan.

Sebagai tindak lanjut, PISAgro dan Regenerative Agriculture Working Group akan mengonsolidasikan hasil diskusi untuk menyusun draft definisi pertanian regeneratif, membangun kerangka indikator dan baseline, serta memperkuat kolaborasi multipihak guna mendukung pengembangan pertanian regeneratif di Indonesia.

3. Focus Group Discussion (FGD) - Penguatan Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia: Pelajaran Kelembagaan dari MPOB Malaysia

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) telah melaksanakan FGD “Penguatan Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia: Pelajaran Kelembagaan dari MPOB Malaysia” pada 22 April 2026. FGD ini bertujuan untuk mempresentasikan hasil kajian yang dilakukan oleh INDEF atas dokumen kebijakan, laporan kelembagaan komparatif MPOB (*Malaysian Palm Oil Board*) untuk membandingkan arsitektur tata kelola kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia. Pada akhirnya diharapkan dapat merumuskan rekomendasi desain kelembagaan bagi Indonesia. MPOB (*Malaysia Palm Oil Board*) di Malaysia digunakan sebagai kasus rujukan (*benchmark*), karena dinilai berhasil dan mampu mengintegrasikan fungsi riset, regulasi, data, standard dan advisory kebijakan dalam satu institusi, sehingga meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan daya saing global.

Perbedaan utama antara Indonesia dan Malaysia terletak pada tingkat integrasi kelembagaan dan otoritas data. Model MPOB dinilai unggul karena mampu menjalankan fungsi terpadu sebagai pusat data resmi, regulator teknis, serta rekomendasi kebijakan, sementara di Indonesia fungsi tersebut tersebar di berbagai lembaga. Peranan (tugas dan fungsi) Pemerintah, MPOB dan MPOC di Malaysia dalam menangani kelapa sawit terpetakan dengan jelas jadi tidak tumpang tindih.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membentuk Badan Koordinasi Teknis Nasional yang dapat mengintegrasikan berbagai fungsi seperti pada MPOB. Apakah memperkuat Lembaga yang sudah ada atau membentuk Lembaga baru dengan pertimbangan pembentukan lembaga baru tidak mudah secara politik dan birokrasi.

Beberapa poin usulan hasil FGD:

- Mengoptimalkan peran Komite Pengarah BDPDKS sebagai titik awal koordinasi.
- Pembagian peran yang jelas antar lembaga, mekanisme koordinasi yang tetap menghormati otonomi kementerian, serta struktur yang memungkinkan keputusan strategis tetap di level tinggi (Presiden/Kemenko), namun eksekusi teknis lebih terintegrasi.
- Pembentukan fungsi teknis terpusat yang fokus pada: (1) data dan analisis, (2) pembiayaan dan pengelolaan program, serta (3) penguatan riset dan inovasi.
- Diskusi menegaskan bahwa masa depan daya saing kelapa sawit Indonesia tidak lagi ditentukan oleh produktivitas semata, melainkan oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola data, koordinasi, dan kredibilitas keberlanjutan secara terintegrasi.

Pembelajaran dari MPOB menunjukkan bahwa integrasi fungsi kelembagaan dan level operasional-nya merupakan kunci, namun

implementasinya di Indonesia perlu dilakukan secara adaptif, bertahap, dan mempertimbangkan realitas politik serta struktur birokrasi nasional.

4. Dialog Nasional Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama WWF-Indonesia menyelenggarakan Dialog Nasional: Transformasi Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Kemandirian Pangan sebagai forum multipihak untuk membahas penguatan tata kelola sawit berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dialog ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transformasi sistem pangan di tengah tantangan perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, keterbatasan lahan, serta meningkatnya tuntutan pasar global terhadap komoditas berkelanjutan.

Dalam pembukaan kegiatan, Dewi Lestari Yani Rizki selaku *Chief Conservation Officer* WWF-Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pengelolaan sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Widiastuti selaku Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan menyampaikan arah kebijakan nasional dalam memperkuat sistem pangan berkelanjutan melalui integrasi sektor pangan dan perkebunan, termasuk peran strategis kelapa sawit dalam menjaga stabilitas pasokan minyak pangan nasional.

Diskusi pada sesi pertama mengangkat tema Kerangka Kerja Nasional untuk Mendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Ketahanan Pangan. Para narasumber dari Bappenas, Kemenko Pangan, Kementerian Dalam Negeri, dan IPB University membahas transformasi sistem pangan

nasional, integrasi program pusat dan daerah, serta kontribusi kelapa sawit terhadap ketahanan pangan Indonesia. Dalam sesi ini juga disoroti pentingnya peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, penguatan inklusi pekebun swadaya dalam rantai pasok, serta penerapan praktik budidaya yang lebih berkelanjutan.

Sesi kedua membahas Pentingnya Sistem Keberlanjutan dalam Menjawab Permintaan Pasar dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, UGM, BPDP, KADIN, dan WWF-Indonesia. Diskusi menyoroti implementasi ISPO, strategi pemulihan lanskap, skema pendanaan dan insentif bagi pekebun swadaya, hingga tantangan pasar global terhadap komoditas sawit berkelanjutan. Para pembicara menekankan bahwa penguatan sertifikasi, akses pembiayaan, pendampingan petani, dan rantai pasok inklusif menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, dialog juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap pekebun swadaya, termasuk akses bibit unggul, pupuk, teknologi, informasi, penguatan kelembagaan, serta konsultasi dan pembiayaan untuk mendukung penerapan praktik berkelanjutan. Pendekatan intensifikasi dinilai menjadi strategi penting untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperluas lahan, sekaligus menjawab tuntutan global terkait komoditas bebas deforestasi dan rantai pasok yang transparan.

Melalui dialog ini, para peserta mendorong perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, lembaga pembiayaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan yang inklusif. Penguatan kebijakan, dukungan pasar, sistem pembiayaan, dan indikator keberlanjutan dinilai menjadi elemen penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun swadaya, menjaga stabilitas sistem pangan nasional, serta

memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global komoditas kelapa sawit berkelanjutan.

5. Rapat Umum Anggota Filantropi Indonesia

Perhimpunan Filantropi Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) 2026 pada 23 April 2026 di Auditorium Puri Dani, IPMI International Business School, Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi, arah program kerja, serta penguatan kolaborasi antaranggota dalam mendorong ekosistem filantropi yang lebih inklusif dan berdampak di Indonesia.

Kegiatan diawali dengan sesi *Town Hall Multi-Stakeholder Forum* Pengentasan Kemiskinan yang menjadi ruang dialog lintas pemangku kepentingan mengenai peran strategis filantropi dalam mendukung pembangunan sosial dan pengurangan kemiskinan secara kolaboratif. Pada sesi Rapat Umum Anggota, Badan Pengurus menyampaikan laporan pelaksanaan program dan laporan keuangan tahun buku 2025, sekaligus memaparkan rencana kerja dan prioritas organisasi untuk tahun 2026. Pembahasan juga mencakup pengesahan anggota baru, perubahan anggaran rumah tangga, serta rencana pergantian kepengurusan sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi.

Selain agenda organisasi, Filantropi Indonesia juga memaparkan sejumlah inisiatif strategis untuk tahun 2026, termasuk pengembangan platform *impact directory* dan *learning*, penguatan *philanthropy hub* dan klaster filantropi, serta peningkatan kolaborasi multipihak untuk memperluas dampak sosial yang lebih terukur dan berkelanjutan. Kegiatan ditutup dengan sesi penghargaan anggota sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan partisipasi anggota dalam memperkuat gerakan filantropi Indonesia.

6. **CNBC Indonesia *Food Summit* 2026**

PISAgro turut berpartisipasi dalam CNBC Indonesia *Food Summit* 2026 yang diselenggarakan pada 27 April 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan. Forum ini menjadi ruang diskusi lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas penguatan ketahanan pangan, keamanan pangan, serta tantangan global yang memengaruhi sektor pangan nasional.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Bapak Zulkifli Hasan, yang menyoroti pentingnya penguatan sistem pangan nasional yang aman, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian *Food Safety Excellence Award* 2026 kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono.

Rangkaian panel diskusi dalam forum ini mengangkat berbagai isu strategis terkait keamanan pangan dan keberlanjutan sistem pangan nasional. Pada sesi “Food Safety for a Sustainable Economy: Driving Policy, Direction, and Implementation”, para narasumber membahas pentingnya sinergi kebijakan dan implementasi keamanan pangan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, sesi “Food Safety as the Key to the Success of the MBG Program” menyoroti pentingnya keamanan pangan dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penguatan kualitas gizi, rantai pasok pangan, dan kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya.

Forum juga membahas dampak dinamika global terhadap ketahanan pangan nasional melalui sesi “The Impact of Global Tensions on Food Security and Safety”. Diskusi menyoroti tantangan geopolitik global, stabilitas rantai pasok, ketersediaan pupuk, serta pentingnya penguatan industri pangan domestik untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Selain itu, isu *blue economy* dan keamanan pangan sektor kelautan turut menjadi perhatian dalam sesi “Food Safety in Blue Economy”, yang membahas penguatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk mendukung keamanan pangan nasional.

Melalui partisipasi dalam CNBC Indonesia Food Summit 2026, PISAgro terus memperkuat kolaborasi multipihak dalam mendukung transformasi sistem pangan Indonesia yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh menghadapi tantangan global.

7. FGD Studi Baseline Pengembangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Kakao Berkelanjutan

Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menugaskan Team Konsultan dari ITB untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Kakao Indonesia 2025-2045 menuju “Indonesia sebagai Hub Kakao Berkelanjutan Global” selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Pertemuan telah dilaksanakan dua kali, pertama pada tanggal 30 Maret 2026 yang membahas mengenai Teknis Pengembangan TOR untuk Studi Rencana Aksi Kakao Berkelanjutan. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 yang bertujuan membuat *baseline* dan memperoleh masukan terhadap penyusunan dokumen studi untuk pengembangan peta jalan dan strategi nasional kakao berkelanjutan.

Presentasi materi pada pertemuan tersebut disampaikan oleh Pejabat dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Bappenas. Diharapkan Tim Konsultan ITB dapat menyerap dan memahami bahan-bahan dimaksud dalam rangka penulisan Rencana Aksi Kakao Berkelanjutan. Dijadwalkan Rencana Aksi ini dapat diajukan ke Bappenas pada Agustus 2026 sebagai bahan untuk penyusunan RPJMN Pusat dan RKPD di daerah. Rencana Aksi ini juga ditujukan sebagai masukan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Pada pertemuan tersebut, Sdri. Ferial yang hadir mewakili Sekretariat PISAgro menyampaikan masalah utama yang ditemui oleh Anggota PISAgro yang menangani komoditi kakao adalah tidak sinkronnya data mengenai kakao antara Pemerintah/Kementerian, Asosiasi dan Internasional. Hal ini perlu ditangani segera karena dapat menjadi masalah dalam penyusunan kebijakan untuk perdagangan dalam negeri maupun ekspor. Kedua, dalam penyusunan Rencana Aksi ini peranan dan masukan dari pihak swasta/Perusahaan sangat penting karena dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman di lapang. PISAgro menawarkan untuk mengadakan forum diskusi langsung antara Tim Konsultan ITB dengan Perusahaan kakao anggota PISAgro. Hal ini disambut baik dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

8. Audiensi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat – Gerakan Indonesia Berdaya

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional, PISAgro sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama *Multi-Stakeholder Forum* (MSF) Aliansi Filantropi Indonesia yang diinisiasi

oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Forum Zakat (FOZ), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) pada tanggal 30 Januari 2026.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong sinergi antara sektor swasta, filantropi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah dalam mendukung penguatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan kolaboratif berbasis ekosistem. Melalui kemitraan ini, PISAgro berperan dalam menghadirkan perspektif sektor pertanian dan model *Inclusive Closed Loop* (ICL) sebagai pendekatan yang dapat memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat desa melalui integrasi petani dalam rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari kolaborasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Implementasi Gerakan Indonesia Berdaya dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 30 April 2026 di Jakarta. Pertemuan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Kemenko PM, PFI, FOZ, HFI, MSF, dan PISAgro untuk memperkuat sinergi dan penyelarasan intervensi program dalam mendukung agenda nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam arahannya, Kemenko PM menekankan pentingnya membangun pendekatan kolaboratif berbasis ekosistem melalui pemadanan data lokasi intervensi, penetapan desa prioritas, serta penyelarasan program antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan intervensi dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, terukur, dan saling melengkapi. Forum juga menyoroti perlunya pengembangan sistem dashboard dan interoperabilitas data antar platform guna memperkuat mekanisme pelaporan, monitoring, dan pembuktian kontribusi program terhadap agenda penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, diskusi menegaskan bahwa implementasi Gerakan Indonesia Berdaya perlu

diintegrasikan dengan berbagai program prioritas nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat agar dampak intervensi dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, PISAgro menyampaikan perspektif mengenai pentingnya pengukuran pendapatan layak petani sebagai indikator kesejahteraan yang relevan untuk melihat kontribusi sektor usaha terhadap rumah tangga petani. PISAgro juga menjelaskan bahwa data yang selama ini dikembangkan bersama perusahaan anggota mencakup informasi terkait jumlah petani, komoditas, dan desa intervensi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pendekatan yang dibangun PISAgro tidak hanya berfokus pada aktivitas CSR, tetapi juga pada penguatan desa yang menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan melalui model *Inclusive Closed Loop* (ICL), sehingga keberlanjutan program dapat lebih terhubung dengan ekosistem usaha, akses pasar, serta peningkatan produktivitas dan pendapatan petani secara berkelanjutan. Dalam forum ini, PISAgro turut menyampaikan kesiapan untuk mendukung pemadanan data lokasi intervensi perusahaan anggota serta mendorong kontribusi sektor swasta agar lebih selaras dengan prioritas pemerintah terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Diskusi juga menyoroti pentingnya membangun model intervensi yang tidak berjalan secara parsial, melainkan menghadirkan beberapa pendekatan sekaligus dalam satu wilayah prioritas agar dampak yang dihasilkan lebih komprehensif. Pendekatan ekosistem ini dipandang penting untuk memastikan bahwa intervensi tidak hanya menyasar bantuan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan rantai nilai yang lebih inklusif. Selain itu, forum menekankan perlunya harmonisasi program yang

sudah berjalan agar agenda kolaborasi tidak tumpang tindih dan dapat memperkuat efektivitas implementasi di lapangan.

Dalam pembahasan teknis, para peserta juga mendiskusikan pengembangan dashboard dan mekanisme interoperabilitas data antar lembaga untuk memperkuat koordinasi dan pengukuran dampak program. Platform ini diharapkan dapat menjadi instrumen bersama untuk memetakan lokasi intervensi, mengidentifikasi kesenjangan wilayah prioritas, serta memperlihatkan kontribusi nyata berbagai pihak terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan SDGs. PISAgro memandang pendekatan ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat integrasi data sektor pertanian dan menunjukkan bagaimana model kemitraan *Inclusive Closed Loop* dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih terukur dan berbasis data.

Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta menyepakati perlunya pembentukan Tim Kerja Teknis Gerakan Indonesia Berdaya yang melibatkan pemerintah, jejaring filantropi, NGO, dan sektor swasta untuk memperkuat koordinasi implementasi di lapangan. Forum juga menyepakati pelaksanaan pemadanan data lokasi intervensi, pengembangan mekanisme integrasi data berbasis interoperabilitas/open API, pelaksanaan field assessment pada lokasi prioritas, serta koordinasi rutin mingguan guna memastikan kesiapan implementasi program dan penguatan kolaborasi multipihak secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2026. Ke depan, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pada sektor pertanian dan penguatan ekonomi desa.

9. Focus Group for Solution - Dekarbonisasi Ekosistem Padi di Indonesia



Pada Kamis, 30 April, 2026, PISAgro turut hadir dalam “Focus Group for Solution: Decarbonizing Indonesia’s Rice Ecosystem” yang diselenggarakan oleh Pijar Foundation dan Philanthropy Asia Alliance, dengan dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Diskusi ini menyoroti pentingnya transformasi sistem produksi padi rendah emisi sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung target Net Zero Emissions Indonesia 2060. Forum ini juga menekankan bahwa keberhasilan adopsi *low carbon rice* akan sangat ditentukan oleh adanya model bisnis yang jelas dan menguntungkan bagi petani, baik melalui peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, maupun akses pasar yang lebih kuat.

Dalam forum tersebut, PISAgro menyampaikan bahwa permintaan terhadap *low carbon rice* sebenarnya sudah mulai muncul, namun skalanya masih belum masif. Di sisi lain, kapasitas produksi dari anggota dan mitra PISAgro juga masih relatif terbatas sehingga belum mampu memenuhi potensi pasar yang lebih luas. PISAgro juga

menyoroti tantangan penting dari sisi pasar, yaitu kesiapan konsumen untuk menerima harga beras rendah karbon yang cenderung lebih premium dibandingkan beras konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga edukasi pasar dan penguatan rantai nilai agar manfaat ekonomi dapat dirasakan seluruh aktor, terutama petani kecil.

PISAgro turut menekankan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem *low carbon rice*, termasuk regulasi yang dapat mendorong keterlibatan sektor swasta beserta skema insentifnya. Dari sisi pembiayaan, PISAgro menilai bahwa skema pembiayaan melalui Himbara sejauh ini menjadi salah satu pendekatan yang paling berhasil menjangkau petani. Selain itu, *innovative finance* juga dinilai berpotensi menjadi alternatif pembiayaan untuk mendukung transisi menuju pertanian rendah karbon, meskipun tetap perlu memperhatikan aspek bunga, tenor, dan kemudahan administrasi agar tetap sesuai dengan kondisi petani. Menutup diskusi, PISAgro menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan *low carbon rice* hanya dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga pembiayaan, organisasi petani, dan mitra pembangunan.

Highlights

1. Oxford Economics Study Launch

As the agri-food sector continues to play an increasingly important role in supporting job creation, sustaining livelihoods, and strengthening national economic resilience amid regional and global economic dynamics, the sector has become a key area of attention. The forum also brought together stakeholders from government, industry, associations, and academia to discuss how Indonesia can leverage the potential of the agri-food sector as a driver of more inclusive and resilient growth.

In this context, Food Industry Asia (FIA) and the ASEAN Food & Beverage Alliance (AFBA) organized the launch of a report titled “The Economic Impact of the Agri-Food Sector in Indonesia: Economic Insights – Unlocking Indonesia’s Agri-Food Powerhouse” on 1 April 2026 at Habitate Jakarta. The forum marked the launch of the latest Oxford Economics 2026 study highlighting the contribution of the agri-food sector to trade, investment, competitiveness, and Indonesia’s broader economic growth.

The event opened with welcoming remarks from Matt Kovac, Senior Advisor & Board Member of AFBA, followed by a scene-setting speech by Satvinder Singh, Deputy Secretary-General of the ASEAN Economic Community, who emphasized the importance of strengthening regional cooperation in the food and agriculture sector across ASEAN.

During the keynote session, Leonardo A.A. Teguh Sambodo from Bappenas presented Indonesia’s Golden Vision 2045 through agritech-based food system transformation and industrialization. He highlighted the strategic role of the agri-food sector in driving economic growth, job creation, and national competitiveness, underscoring the need for stronger investment, policy reform, and multi-stakeholder collaboration.

Meanwhile, Dr. Pham Quang Minh from the ASEAN Secretariat highlighted the ASEAN Strategic Plan of Action for Cooperation in the Food and Agriculture Sector, particularly in relation to trade facilitation, economic integration, food security, food safety, and more equitable food distribution across the region.

The main presentation on the Oxford Economics study findings was delivered by James Lambert, Director for Economics Consulting in Asia at Oxford Economics. He explained that Indonesia's agri-food sector is making an increasingly significant contribution to the national economy through value creation, employment generation, and strengthening domestic and regional supply chains. The study also emphasized the importance of investing in infrastructure, productivity, technology, and supply chain efficiency to maintain the sector's future competitiveness.

The forum also featured an industry-sharing session by GAPMMI Chairman Adhi Lukman, who highlighted the food and beverage industry's contribution to national economic growth, as well as ongoing challenges related to trade, food infrastructure, logistics, and supply chain efficiency.

A panel discussion titled "Industry Pathways to a More Competitive and Resilient Agri-Food Economy" brought together representatives from industry, academia, and government to discuss strategies for strengthening supply chains, increasing productivity, and responding to market dynamics and changing consumption patterns. The discussion emphasized that the resilience of the agri-food sector depends not only on production capacity, but also on the ability to build a more integrated, efficient, and adaptive supply chain ecosystem in response to global changes.

PISAgro also participated in the forum and was represented by Mr.

Insan Syafaat, Executive Director of PISAgro. PISAgro's participation underscored the importance of multi-stakeholder collaboration in strengthening Indonesia's food system transformation toward a more inclusive, resilient, and sustainable future. The forum also served as a strategic platform for strengthening exchanges between the private sector, government, associations, and development partners in advancing a more competitive Indonesian agri-food sector at both regional and global levels.

2. PISAgro Regenerative Agriculture Workshop



Strengthening collaboration to address food system challenges, PISAgro through its Regenerative Agriculture Working Group organized the PISAgro's Regenerative Agriculture Workshop titled "Establishing a Baseline Definition and Core Components of Regenerative Agriculture" on 6 April 2026 at Grha Unilever, BSD City. The workshop served as a multi-stakeholder collaboration platform bringing together the private sector, academia, development institutions, civil society organizations, and industry actors to build a shared understanding of regenerative agriculture in Indonesia, while strengthening the role of the agriculture and food sectors in supporting economic resilience, environmental sustainability, and a more resilient food system transformation.

The event was opened by Ms. Nurdiana Darus, Regenerative Agriculture Working Group Leader, who emphasized the importance of cross-sector collaboration in driving the transformation of Indonesia's agricultural sector. She highlighted key challenges facing agriculture, including soil degradation, climate change, and pressure on natural resources, while also noting that PISAgro members have begun implementing regenerative practices across 130,000 hectares, with a target of reaching 1 million hectares by 2030.

The session continued with a presentation by Mr. Ross Jaax, who emphasized that regenerative agriculture is not only focused on reducing environmental impacts, but also on restoring soil health, biodiversity, water management, and strengthening farmer livelihoods. He also highlighted the importance of data and measurement systems such as MRV (Measurement, Reporting, and Verification) to support the implementation of regenerative practices in Indonesia.

During the main session, Mr. Sarvesh Singh discussed the growing global attention toward regenerative agriculture and Indonesia's opportunities to accelerate food system transformation through regenerative approaches, despite challenges related to financing, certification, infrastructure, and data limitations. He also highlighted opportunities in agroforestry, local bio-inputs, carbon financing, and digital systems.

The workshop also featured a panel discussion with Prof. Dr. Ir. Herdhata Agusta, Rahmad Supriyanto, and Edy Hartono, who discussed the implementation of regenerative agriculture in Indonesia. The discussion highlighted the importance of soil health, input efficiency, utilization of local biomass, policy strengthening, and experiences in implementing regenerative practices within the independent smallholder palm oil sector.

Discussions with participants also generated various inputs regarding definitions, indicators, and regenerative agriculture practices relevant to Indonesia, including soil health, biodiversity, water management, emissions reduction, farmer welfare, as well as the importance of economic incentives and access to financing.

The workshop concluded with remarks from Mr. Insan Syafaat, Executive Director of PISAgro, who emphasized the importance of developing a shared definition and priority components of regenerative agriculture as the foundation for future collective action and advocacy.

As a follow-up, PISAgro and the Regenerative Agriculture Working Group will consolidate the discussion outcomes to develop a draft definition of regenerative agriculture, establish indicator frameworks and baselines, and strengthen multi-stakeholder collaboration to support the advancement of regenerative agriculture in Indonesia.

3. Focus Group Discussion (FGD) – Strengthening Indonesian Palm Oil Governance: Institutional Lessons from Malaysia’s MPOB

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) organized an FGD titled “Strengthening Indonesian Palm Oil Governance: Institutional Lessons from Malaysia’s MPOB” on 22 April 2026. The FGD aimed to present the results of a study conducted by INDEF on policy documents and comparative institutional reports on the Malaysian Palm Oil Board (MPOB), comparing the governance architecture of the palm oil sector in Malaysia and Indonesia. Ultimately, the discussion sought to formulate institutional design recommendations for Indonesia. MPOB was used as a benchmark case because it is considered successful in integrating research, regulation,

data management, standards, and policy advisory functions within a single institution, thereby improving decision-making efficiency and global competitiveness.

The key difference between Indonesia and Malaysia lies in the level of institutional integration and data authority. The MPOB model is considered superior due to its ability to function simultaneously as an official data center, technical regulator, and policy advisory body, while in Indonesia these functions remain dispersed across multiple institutions. In Malaysia, the roles and responsibilities of the government, MPOB, and MPOC in managing the palm oil sector are clearly defined, minimizing institutional overlap.

A key question raised during the discussion was how Indonesia could establish a National Technical Coordinating Body capable of integrating various functions similar to MPOB. The debate focused on whether Indonesia should strengthen existing institutions or establish a new institution, considering that creating a new body would be politically and bureaucratically challenging.

Several recommendations emerged from the FGD:

- Optimizing the role of the BDPKS Steering Committee as an initial coordination platform.
- Establishing clear division of roles among institutions, with coordination mechanisms that respect ministerial autonomy while enabling strategic decisions to remain at the Presidential or Coordinating Ministry level, alongside more integrated technical execution.
- Developing centralized technical functions focused on: (1) data and analysis, (2) financing and program management, and (3) strengthening research and innovation.
- The discussion emphasized that the future competitiveness of Indonesia's palm oil sector will no longer be determined solely

by productivity, but also by institutional capacity in managing data, coordination, and sustainability credibility in an integrated manner.

Lessons from MPOB demonstrate that institutional integration and operational coherence are key factors for success. However, implementation in Indonesia must be carried out adaptively and gradually, while taking into account the country's political realities and bureaucratic structure.

4. National Dialogue on Sustainable Palm Oil Management

The Coordinating Ministry for Food Affairs, in collaboration with WWF-Indonesia, organized the National Dialogue: Transformation of Sustainable Palm Oil Management for Food Self-Sufficiency as a multi-stakeholder forum to discuss strengthening sustainable palm oil governance in support of national food security. The dialogue was held against the backdrop of the growing importance of transforming food systems amid challenges posed by climate change, geopolitical uncertainty, limited land availability, and increasing global demand for sustainable commodities.

In the opening session, Dewi Lestari Yani Rizki, Chief Conservation Officer of WWF-Indonesia, emphasized the importance of cross-sector collaboration in advancing inclusive and sustainable palm oil management. Meanwhile, Widiastuti, Deputy for Coordination of Food and Agriculture Enterprises at the Coordinating Ministry for Food Affairs, presented the national policy direction for strengthening sustainable food systems through the integration of food and plantation sectors, including the strategic role of palm oil in maintaining the stability of Indonesia's edible oil supply.

The first discussion session focused on the National Framework for Supporting Sustainable Palm Oil in Food Security. Speakers from Bappenas, the Coordinating Ministry for Food Affairs, the Ministry of Home Affairs, and IPB University discussed national food system transformation, integration between central and regional government programs, and the contribution of palm oil to Indonesia's food security. The session also highlighted the importance of increasing productivity through intensification, strengthening the inclusion of independent smallholders within supply chains, and implementing more sustainable cultivation practices.

The second session addressed the Importance of Sustainability Systems in Responding to Market Demand, featuring speakers from the Ministry of Agriculture, Universitas Gadjah Mada (UGM), BPDP, KADIN, and WWF-Indonesia. Discussions covered ISPO implementation, landscape restoration strategies, financing schemes and incentives for smallholders, as well as global market challenges for sustainable palm oil commodities. Speakers emphasized that strengthening certification systems, improving access to financing, providing farmer assistance, and building inclusive supply chains are critical factors in enhancing the competitiveness of Indonesian palm oil in international markets.

In addition, the dialogue highlighted the importance of supporting independent smallholders through improved access to high-quality seeds, fertilizers, technology, information, institutional strengthening, as well as consultation and financing to support the adoption of sustainable practices. Intensification approaches were viewed as a key strategy to increase productivity without expanding land use, while also responding to global demands for deforestation-free commodities and transparent supply chains.

Through this dialogue, participants emphasized the need for collaborative approaches among government institutions, private

sector actors, academia, financial institutions, and civil society organizations to strengthen inclusive sustainable palm oil governance. Strengthened policies, market support, financing systems, and sustainability indicators were identified as key elements to improve smallholder livelihoods, maintain the stability of the national food system, and reinforce Indonesia's position in the global sustainable palm oil market.

5. Philanthropy Indonesia General Assembly

The Indonesian Philanthropy Association held its 2026 General Assembly (Rapat Umum Anggota/RUA) on 23 April 2026 at the Auditorium Puri Dani, IPMI International Business School, Jakarta. The event served as an annual forum to present the organization's accountability report, discuss strategic work plans, and strengthen collaboration among members in advancing a more inclusive and impactful philanthropy ecosystem in Indonesia.

The event began with the Town Hall Multi-Stakeholder Forum on Poverty Alleviation, which provided a platform for cross-sector dialogue on the strategic role of philanthropy in supporting social development and collaborative poverty reduction efforts.

During the General Assembly session, the Board presented the 2025 program implementation and financial reports, while also outlining the organization's work plan and priorities for 2026. Discussions also included the approval of new members, amendments to the organization's bylaws, and plans for leadership succession as part of strengthening organizational governance.

In addition to organizational matters, Philanthropy Indonesia introduced several strategic initiatives for 2026, including the development of an impact directory and learning platform, the strengthening of

philanthropy hubs and thematic philanthropy clusters, as well as enhanced multi-stakeholder collaboration to expand measurable and sustainable social impact.

The event concluded with a member appreciation session to recognize the contributions and participation of members in strengthening Indonesia's philanthropy movement.

6. CNBC Indonesia Food Summit 2026

PISAgro participated in the CNBC Indonesia Food Summit 2026, held on 27 April 2026 at the Auditorium of Menara Bank Mega, South Jakarta. The forum served as a cross-sector discussion platform bringing together government representatives, industry players, academics, and other stakeholders to discuss strengthening food security, food safety, and global challenges affecting Indonesia's food sector.

The event opened with remarks from the Coordinating Minister for Food Affairs of the Republic of Indonesia, Mr. Zulkifli Hasan, who highlighted the importance of strengthening a safe, sustainable, and resilient national food system capable of supporting economic growth. On this occasion, the Food Safety Excellence Award 2026 was also presented to the Coordinating Minister for Food Affairs and the Minister of Marine Affairs and Fisheries, Mr. Sakti Wahyu Trenggono.

The forum featured a series of panel discussions addressing strategic issues related to food safety and the sustainability of Indonesia's food system. In the session titled "Food Safety for a Sustainable Economy: Driving Policy, Direction, and Implementation," speakers discussed the importance of policy synergy and effective food safety implementation in supporting sustainable economic development.

Meanwhile, the session “Food Safety as the Key to the Success of the MBG Program” emphasized the critical role of food safety in supporting the success of the Free Nutritious Meals (MBG) program, including strengthening nutritional quality, food supply chains, and cross-sector collaboration in implementation.

The forum also examined the impact of global dynamics on national food security through the session “The Impact of Global Tensions on Food Security and Safety.” Discussions highlighted global geopolitical challenges, supply chain stability, fertilizer availability, and the importance of strengthening domestic food industries to maintain Indonesia’s food security.

In addition, blue economy and food safety in the marine sector were discussed in the session “Food Safety in Blue Economy,” which explored efforts to strengthen sustainable marine and fisheries resource management in support of national food security.

Through its participation in the CNBC Indonesia Food Summit 2026, PISAgro continues to strengthen multi-stakeholder collaboration in supporting the transformation of Indonesia’s food system toward a more sustainable, inclusive, and resilient future amid global challenges.

7. FGD on the Baseline Study for the Development of a Sustainable Cocoa Roadmap and Action Plan

The Coordinating Ministry for Food Affairs appointed a consultant team from the Bandung Institute of Technology (ITB) to develop the Indonesian Cocoa National Action Plan 2025–2045 toward “Indonesia as a Global Sustainable Cocoa Hub,” aligned with the vision of Golden Indonesia 2045. Two meetings have been conducted in relation to this initiative. The first meeting, held on 30 March 2026, discussed

the technical development of the Terms of Reference (TOR) for the Sustainable Cocoa Action Plan Study. The second meeting, held on 28 April 2026, aimed to establish a baseline and gather inputs for the preparation of the study document for the development of the sustainable cocoa roadmap and national strategy.

Presentations during the meeting were delivered by officials from the Ministry of Industry, Ministry of Agriculture, Environmental Fund Management Agency (BPDLH), and Bappenas. It is expected that the ITB Consultant Team will absorb and understand the presented materials in support of drafting the Sustainable Cocoa Action Plan. The Action Plan is scheduled to be submitted to Bappenas in August 2026 as an input for the preparation of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and Regional Government Work Plans (RKPD). The Action Plan is also intended to contribute to the formulation of the 2027 Government Work Plan (RKP).

During the meeting, Mrs. Ferial, representing the PISAgro Secretariat, highlighted that one of the main issues faced by PISAgro members involved in the cocoa commodity sector is the inconsistency of cocoa-related data among government institutions/ministries, associations, and international sources. This issue needs to be addressed immediately, as it could create challenges in the formulation of both domestic trade and export policies. Secondly, she emphasized that the role and input of the private sector and companies are essential in the preparation of the Action Plan, as they can provide insights based on field-level experience. PISAgro also offered to facilitate a direct discussion forum between the ITB Consultant Team and cocoa companies that are members of PISAgro. This proposal was well received and is expected to be implemented in the near future.

8. Coordination Meeting with the Coordinating Ministry for Community Empowerment – Gerakan Indonesia Berdaya

As part of efforts to strengthen cross-sector collaboration in supporting the national development agenda, PISAgro had previously signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Multi-Stakeholder Forum (MSF) of the Indonesian Philanthropy Alliance, initiated by the Indonesian Philanthropy Association (PFI), Forum Zakat (FOZ), and Humanitarian Forum Indonesia (HFI) on 30 January 2026.

This collaboration aims to encourage synergy among the private sector, philanthropy organizations, civil society organizations, and the government in supporting village development, improving community welfare, and accelerating the eradication of extreme poverty through a collaborative ecosystem-based approach. Through this partnership, PISAgro contributes perspectives from the agricultural sector and the Inclusive Closed Loop (ICL) model as an approach to strengthen the economic sustainability of rural communities through the integration of farmers into inclusive and sustainable supply chains.

As a follow-up to this collaboration, the Coordinating Ministry for Community Empowerment organized a Follow-Up Coordination Meeting on the Implementation of the Gerakan Indonesia Berdaya for the Acceleration of Extreme Poverty Eradication on 30 April 2026 in Jakarta. The meeting brought together various cross-sector stakeholders, including the Coordinating Ministry for Community Empowerment, PFI, FOZ, HFI, MSF, and PISAgro, to strengthen synergy and align program interventions in support of the national agenda for accelerating extreme poverty eradication.

In its direction, the Coordinating Ministry emphasized the importance

of building an ecosystem-based collaborative approach through matching intervention location data, determining priority villages, and aligning programs among stakeholders to ensure that interventions are more targeted, measurable, coordinated, and complementary. The forum also highlighted the need to develop dashboard systems and data interoperability across platforms to strengthen reporting, monitoring, and evidence mechanisms regarding program contributions to the extreme poverty eradication agenda. In addition, discussions emphasized that the implementation of Gerakan Indonesia Berdaya should be integrated with various national priority programs such as the Red-and-White Village/Subdistrict Cooperatives Program, the Free Nutritious Meals (MBG) Program, and Sekolah Rakyat to ensure more comprehensive and sustainable impacts.

During the meeting, PISAgro presented perspectives on the importance of measuring living income for farmers as a relevant welfare indicator to assess the contribution of businesses to farming households. PISAgro also explained that the data developed together with member companies includes information on the number of farmers, commodities, and intervention villages spread across various regions of Indonesia.

The approach developed by PISAgro does not focus solely on Corporate Social Responsibility (CSR) activities, but also on strengthening villages that are part of company supply chains through the Inclusive Closed Loop (ICL) model. This ensures that program sustainability is more closely linked to business ecosystems, market access, and sustainable improvements in farmer productivity and income. During the forum, PISAgro also expressed its readiness to support the matching of intervention location data from member companies and to encourage private sector contributions that are more aligned with government priorities related to accelerating extreme poverty eradication.

Discussions also emphasized the importance of building intervention models that do not operate partially, but instead integrate multiple approaches within the same priority area to generate more comprehensive impacts. This ecosystem approach was considered essential to ensure that interventions not only provide short-term assistance, but also strengthen community economic capacity through empowerment, access to financing, institutional strengthening, and the development of more inclusive value chains. In addition, the forum emphasized the need to harmonize ongoing programs to avoid overlap and strengthen implementation effectiveness in the field.

In the technical discussions, participants also explored the development of dashboards and data interoperability mechanisms among institutions to strengthen coordination and impact measurement. This platform is expected to become a shared instrument for mapping intervention locations, identifying gaps in priority areas, and demonstrating the concrete contributions of various stakeholders toward achieving national development goals and the SDGs. PISAgro views this approach as a strategic opportunity to strengthen agricultural sector data integration and demonstrate how the Inclusive Closed Loop partnership model can contribute to improving the welfare of rural communities in a more measurable and data-driven manner.

As a follow-up, all participants agreed on the need to establish a Technical Working Team for Gerakan Indonesia Berdaya involving government institutions, philanthropy networks, NGOs, and the private sector to strengthen implementation coordination in the field. The forum also agreed on conducting intervention location data matching, developing interoperability/open API-based data integration mechanisms, carrying out field assessments in priority locations, and conducting weekly coordination meetings to ensure program implementation readiness and strengthen sustainable multi-stakeholder collaboration through the end of 2026. Moving forward, this collaboration is expected to

become the foundation for developing more integrated, adaptive, and sustainable community empowerment models in support of the national development agenda, particularly in the agricultural sector and rural economic strengthening.

9. Focus Group for Solution: Decarbonizing Indonesia's Rice Ecosystem



On Thursday, April 30, 2026, PISAgro participated in the “Focus Group for Solution: Decarbonizing Indonesia’s Rice Ecosystem” organized by Pijar Foundation and Philanthropy Asia Alliance, with support from the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The discussion highlighted the importance of transforming low-emission rice production systems as part of efforts to maintain food security while supporting Indonesia’s Net Zero Emissions 2060 target. The forum also emphasized that the successful adoption of low-carbon rice will largely depend on the availability of clear and profitable business models for farmers, whether through increased productivity, greater production cost efficiency, or stronger market access.

During the forum, PISAgro conveyed that demand for low-carbon

rice has begun to emerge, although it has not yet reached a massive scale. On the other hand, the production capacity of PISAgro members and partners remains relatively limited and is not yet able to meet broader market potential. PISAgro also highlighted an important market challenge, namely consumer readiness to accept the higher price of low-carbon rice compared to conventional rice. Therefore, an approach focused not only on production but also on market education and value chain strengthening is needed to ensure that economic benefits can be enjoyed by all actors, especially smallholder farmers.

PISAgro also emphasized the importance of government policy support to accelerate the development of the low-carbon rice ecosystem, including regulations that can encourage private sector involvement along with supporting incentive schemes. From a financing perspective, PISAgro noted that financing schemes through Himbara have so far been among the most successful approaches in reaching farmers. In addition, innovative finance was also seen as having strong potential as an alternative financing mechanism to support the transition toward low-carbon agriculture, although considerations regarding interest rates, loan tenors, and administrative simplicity remain essential to ensure suitability with farmers' conditions.

In closing the discussion, PISAgro reaffirmed that the successful development of low-carbon rice can only be achieved through multi-stakeholder collaboration involving the government, private sector, financial institutions, farmer organizations, and development partners.

Profil

Memberdayakan Petani: Kisah Ibu Mery, Petani Kakao Perempuan Binaan Koltiva dari Aceh Tenggara

Fathan Oktrisaf, Ferial Lubis,
Hendri Surya Widaksana



Pagi hari di Lawe Bekung, Tampahan, Aceh Tenggara, kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon kakao ketika Ibu Mery Krismas mulai beraktivitas di kebunnya. Dengan langkah tenang, ia memeriksa satu per satu tanaman yang menjadi sumber penghidupan sekaligus ruang pengabdian baginya. Bagi Mery, bertani bukan sekadar pekerjaan, ia adalah cara untuk merawat kehidupan.

Perjalanan Mery menuju dunia pertanian tidaklah biasa. Dari kehidupan sebagai biarawati hingga akhirnya kembali ke kampung halaman pada tahun 2015, ia menemukan makna baru dalam relasinya dengan alam dan komunitas. Di tengah tantangan akses, perubahan iklim, dan peran ganda perempuan, Mery tetap berdiri sebagai bagian dari generasi petani yang menjaga keberlanjutan dari akar rumput.

Ia bukan satu-satunya. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) Badan Pusat Statistik, dari total sekitar 29,3 juta pengelola usaha pertanian perorangan di Indonesia, tercatat sekitar 4,2 juta di antaranya adalah perempuan atau sekitar 15% dari keseluruhan pengelola pertanian nasional. Angka ini mencerminkan kontribusi nyata perempuan di sektor pertanian, sekaligus menunjukkan bahwa pengakuan formal atas peran mereka masih belum sebanding dengan kehadiran mereka di lapangan (Sensus BPS, 2023).

Bagi Mery, dukungan agar para petani dapat

terus bertani tanpa merusak lahan menjadi hal yang sangat penting. Melalui partisipasinya dalam Agri Solution Program bersama Koltiva, ia dan komunitasnya kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap input pertanian, pendampingan lapangan, serta pelatihan yang membantu meningkatkan hasil panen kakao secara berkelanjutan. Kehadiran Koltiva juga dirasakan membawa perubahan yang lebih inklusif bagi perempuan petani, karena mereka dapat mengakses dukungan dan pembiayaan tanpa diskriminasi, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam mendorong praktik pertanian yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.

Dalam wawancara berikut, Ibu Mery berbagi kisah, refleksi, dan harapannya tentang pertanian, perempuan, dan masa depan sistem pangan yang lebih inklusif.

1. Selamat pagi, Ibu Mery. Bisa diceritakan apa yang mendorong Ibu Mery memilih menjadi petani?

Sebenarnya yang membuat saya tertarik menjadi petani adalah filosofi bahwa tanah itu seperti ibu. Mother Earth. Ibu yang melahirkan semua kehidupan. Kita hidup dari tanah. Jadi kalau kita mencintai bumi, maka bumi juga akan memberi kehidupan kepada kita.

2. Bagaimana peran perempuan dalam pertanian di komunitas Ibu?

Di tempat kami, hampir semua orang bertani.

Tidak ada perbedaan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Pekerjaan perempuan juga berat, dan hasilnya juga besar. Bahkan, menurut saya, di lapangan justru lebih banyak perempuan yang bekerja dibanding laki-laki.

Namun di balik kontribusi tersebut, perempuan masih menghadapi tantangan yang tidak kecil. Selain bekerja di lahan, perempuan juga tetap memikul tanggung jawab domestik. Pekerjaan rumah tangga tetap harus diselesaikan dulu, baru bisa ke ladang. Jadi tanggung jawabnya berlapis.

3. Apa saja tantangan utama yang dihadapi perempuan petani?

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya. Banyak perempuan tidak memiliki lahan atas nama sendiri, sehingga sulit mengakses pembiayaan, pupuk, maupun dukungan lainnya.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pelatihan juga memengaruhi produktivitas. Kadang kita ingin berkembang, tapi aksesnya terbatas. Misalnya untuk pupuk atau modal, tidak selalu mudah didapat.

4. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap usaha tani Ibu?

Perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang dirasakan langsung di lapangan. Sekarang musim tidak menentu. Kalau musim hujan, banyak tanaman rusak. Kalau kemarau, langsung kering. Air jadi sulit. Rasanya seperti gagal panen terus.

Kondisi ini membuat proses bertani menjadi semakin tidak pasti, dan membutuhkan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi.

5. Apa yang Ibu lakukan untuk menjaga keberlanjutan pertanian?

Saya menerapkan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan keyakinannya untuk menjaga keseimbangan alam. Menurut saya, penting untuk mencintai

lingkungan. Kalau kita menggunakan tanah, jangan sampai merusaknya. Saya mencoba pakai cara-cara organik dalam menanam.

Selain itu, ia juga aktif berbagi pengetahuan dengan petani lain di komunitasnya, mendorong praktik budidaya yang lebih berkelanjutan.

6. Bagaimana peran dukungan eksternal dalam membantu petani seperti Ibu?

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk program pendampingan, memberikan dampak nyata bagi petani. Sekarang kami bisa lebih mudah mengakses pupuk, bahkan bisa dicicil. Tidak ada diskriminasi. Ada juga pelatihan dan pendampingan di lapangan. Itu sangat membantu.

Selain akses input, pendampingan teknis seperti pemangkasan kakao, pengelolaan tanah, hingga informasi pasar juga menjadi nilai tambah yang dirasakan.

7. Apa harapan Ibu ke depan untuk pertanian dan perempuan petani?

Saya berharap perempuan bisa mendapatkan akses yang lebih adil, baik untuk lahan, modal, maupun pelatihan. Karena sebenarnya perempuan punya peran besar di pertanian.

Kalau perempuan didukung, bukan hanya produksi yang meningkat, tapi juga kesejahteraan keluarga dan komunitas. Harapannya, semakin banyak perempuan yang diberi kesempatan dan didukung untuk berkembang.

Kisah Ibu Mery menunjukkan bahwa di balik sistem pangan, ada peran besar perempuan yang sering kali tidak terlihat, namun sangat menentukan. Dari pengelolaan lahan hingga keberlanjutan praktik pertanian, perempuan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat komunitas.

Cerita ini juga mengingatkan bahwa membangun sistem pangan yang inklusif

bukan hanya soal produksi, tetapi juga tentang memastikan akses, kesempatan, dan dukungan yang setara bagi semua, termasuk perempuan petani.

Dari Aceh Tenggara, kisah ini menjadi refleksi bahwa perubahan sering kali dimulai dari hal sederhana: merawat tanah, berbagi pengetahuan, dan membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk tumbuh bersama.

Nantikan edisi berikutnya dari "Memberdayakan Petani," di mana kami akan terus berbagi kisah sukses petani dari berbagai daerah di Indonesia!

Profile

Empowering Farmers: The Story of Mrs. Mery, a Female Cocoa Farmer Supported by Koltiva from Southeast Aceh

Fathan Oktrisaf, Ferial Lubis,
Hendri Surya Widcaksana



Morning breaks slowly in Lawe Bekung, a thin mist still hangs among the cocoa trees as Mery Krismas begins her activities on the farm. With calm steps, she carefully checks each plant that serves not only as her source of livelihood, but also as a space for dedication and purpose. For Mery, farming is not merely a job, it is a way of nurturing life.

Mery's journey into agriculture was far from ordinary. From a life as a nun to eventually returning to her hometown in 2015, she discovered a new meaning in her relationship with nature and the community around her. Amid challenges related to access, climate change, and the multiple roles women carry, Mery continues to stand strong as part of a generation of farmers safeguarding sustainability from the grassroots level.

She is not alone. According to Indonesia's 2023 Agricultural Census (ST2023) by Statistics Indonesia (BPS), out of approximately 29.3 million individual agricultural business operators in Indonesia, around 4.2 million or about 15% are women. This figure reflects the significant contribution of women in agriculture, while also highlighting that formal recognition of their role remains disproportionate to their actual presence and contribution in the field.

For Mery, ensuring that farmers can continue farming without damaging the land is extremely important. Through her participation in the Agri Solution Program

together with Koltiva, she and her community now have easier access to agricultural inputs, field assistance, and training programs that help improve cocoa yields sustainably. Koltiva's presence has also created a more inclusive environment for women farmers, allowing them to access support and financing without discrimination while strengthening the role of women in promoting fair, resilient, and sustainable agricultural practices.

In the following interview, Mrs. Mery shares her story, reflections, and hopes regarding agriculture, women, and the future of a more inclusive food system.

1. Good morning, Mrs. Mery. Could you share what inspired you to become a farmer?

What truly attracted me to farming is the philosophy that the earth is like a mother — Mother Earth. The mother who gives birth to all life. We live from the land. So, if we love the earth, the earth will also give life back to us.

2. How do you see the role of women in agriculture within your community?

In our community, almost everyone is involved in farming. There is no distinction between men's and women's work. Women's work is also demanding, and the results are significant. In fact, from what I see in the field, there are often more women working than men.

However, behind those contributions, women still face major challenges. Besides working on the farm, women also continue to carry domestic responsibilities. Household tasks still need to be completed before going to the fields. So, their responsibilities are layered and continuous.

3. What are the main challenges faced by women farmers?

One of the biggest challenges is limited access to resources. Many women do not own land under their own names, making it difficult to access financing, fertilizers, and other forms of support.

In addition, limited access to technology and training also affects productivity. Sometimes we want to grow and improve, but access is still limited. For example, fertilizers or capital are not always easy to obtain.

4. How has climate change affected your farming activities?

Climate change has become a real challenge that we directly experience in the field. The seasons are now unpredictable. During the rainy season, many crops are damaged. During droughts, everything dries out quickly. Water becomes difficult to obtain. It feels like continuous crop failure.

These conditions make farming increasingly uncertain and require stronger adaptation capabilities.

5. What do you do to maintain agricultural sustainability?

I apply more environmentally friendly farming practices, in line with my belief in maintaining the balance of nature. In my opinion, it is important to love the environment. If we use the land, we should not destroy it. I try to use organic methods in farming.

In addition, she actively shares knowledge with other farmers in her community, encouraging more sustainable cultivation practices.

6. How important is external support for farmers like you?

Support from various parties, including mentoring programs, has had a real impact on farmers. Now we can access fertilizers more easily, and even pay in installments. There is no discrimination. There are also training sessions and field assistance. That has been very helpful.

Beyond access to agricultural inputs, technical assistance such as cocoa pruning, soil management, and market information has also provided significant added value.

7. What are your hopes for the future of agriculture and women farmers?

I hope women can receive fairer access whether to land, capital, or training because women actually play a major role in agriculture.

When women are supported, it is not only production that improves, but also the welfare of families and communities. My hope is that more women will be given opportunities and support to grow and thrive.

Mrs. Mery's story demonstrates that behind every food system, there is a major contribution from women that often goes unseen, yet is deeply essential. From land management to sustainable agricultural practices, women play a crucial role in maintaining food security at the community level.

This story also reminds us that building an inclusive food system is not only about increasing production, but also about ensuring equal access, opportunities, and support for everyone, including women farmers.

From Aceh Tenggara, this story serves as a reflection that change often begins with simple actions: caring for the land, sharing knowledge, and creating opportunities for more people to grow together.

Stay tuned for the next edition of "Empowering Farmers," where we will continue to share inspiring success stories from farmers across Indonesia!



Sinarماس Land Plaza, Tower 2,
22nd Floor. Jl. MH Thamrin 51,
Jakarta 10350, Indonesia

✉ contact@pisagro.org
🌐 www.pisagro.org

📧 [pisagro_secretariat](mailto:pisagro_secretariat@pisagro.org)
📱 [PISAgro](#)

Anggota-anggota PISAgro - *PISAgro Members*



Save the Children



sinarmas



Knowledge grows

Mitra-mitra PISAgro - *PISAgro Partners*



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies



Filantropi
INDONESIA



LTKL
LINGKAR TEMU
KABUPATEN LESTARI



Solidaridad

